Buku Praktikum

SERI: AKUNTANSI PAJAK

Supriyadi

Arief Budi Wardana

Editor:

Fadlil Usman

KATA PENGANTAR

Penyusunan Buku Praktikum seri Akuntansi Pajak bertujuan agar mahasiswa mudah mengaplikasikan konsep-konsep akuntansi dengan peraturan-peraturan perpajakan dalam penghitungan dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam buku praktikum ini, soal-soal yang disajikan berupa studi kasus yang komprehensif (latihan soal beberapa transaksi pembayaran sampai dengan pengisian SPT) dan mencakup kasus-kasus yang mendekati praktek-praktek di lapangan. Mahasiswa juga dapat mengerjakan soal secara parsial dalam studi kasus-studi kasus yang ada dalam buku ini.

Buku praktikum ini juga menjelaskan secara singkat ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan yang terkait konsep pembukuan dan akuntansi pajak antara lain: Akuntansi PPN dan PPnBM dan Pajak Penghasilan, Biaya Fiskal, Rekonsiliasi Fiskal, revaluasi aktiva tetap, investasi saham dan akuntansi jasa konstruksi. Harapan dari penulisan buku ini mahasiswa dapat dengan mudah dan cepat memperoleh acuan ketentuan akuntansi pajak pada saat mengerjakan studi kasus.

Kami para penyusun buku, Supriyadi sebagai penulis pertama, menyadari buku praktikum ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran masih sangat diperlukan untuk penyempurnaannya. Semoga buku praktikum ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan konsep-konsep akuntansi pajak untuk menghitung dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan khususnya kepada Direktur, Ketua Jurusan Perpajakan, Ketua Program Diploma III Perpajakan, Kepala Laboratorium Perpajakan Politeknik Keuangan Negara STAN, dan pihak penerbit serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, sehingga dapat terwujud buku praktikum ini.

Tangerang Selatan, September 2019

Penulis

KATA SAMBUTAN

KEPALA LABORATORIUM PAJAK

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada para penulis dan editor sehingga dapat menyelesaikan Buku Praktikum seri: Akuntansi Pajak. Begitu pula shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Secara khusus tujuan penyusunan buku ini adalah semata-mata untuk menambah literatur bagi mahasiswa yang sedang mempelajari mata kuliah praktikum perpajakan. Selain itu, secara umum buku ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi masyarakat dan manfaat bagi semua pembelajar.

Kami mewakili tim Laboratorium Jurusan Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN mengapresiasi kepada semua penyusun buku dan mengucapkan terima kasih kepada segenap civitas akademika kampus PKN STAN dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini serta kepada penerbit ANDI. Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Tangerang Selatan,   September 2019

Benny Setiawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
KATA SAMBUTAN iii
KEPALA LABORATORIUM PAJAK iii
DAFTAR ISI iv
BAB I PEMBUKUAN DAN KONSEP DASAR AKUNTANSI PAJAK 1
1. Pengertian Pembukuan 1
2. Pembukuan Perpajakan 1
3. Akuntansi Pajak 3
4. Konsep Dasar Akuntansi Pajak 3
BAB II AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN 4
1. PPh Pasal 21/26 4
2. PPh Pasal 22 4
3. PPh Pasal 23/26 5
4. PPh Pasal 4 ayat (2) 5
BAB III AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 6
BAB IV REKONSILIASI FISKAL 7
1. Siklus Akuntansi Komersial dan Fiskal 7
2. Rekonsiliasi Fiskal atas Penghasilan 7
3. Daftar Rekonsiliasi Fiskal Biaya Usaha 8
BAB V AKUNTANSI *LEASING* 11
1. Klasifikasi Sewa 11
2. Ketentuan Sewa secara Komersial 11
3. Ketentuan PPh atas Sewa 11
4. Ketentuan PPN atas sewa 12
5. Aspek Pajak atas Sewa 13
BAB VI REVALUASI ASET TETAP 14
BAB VII AKUNTANSI KONTRAK KONSTRUKSI 15
BAB VIII KUMPULAN SOAL LATIHAN 17
BAB IX STUDI KASUS AKUNTANSI PAJAK 32
1. STUDI KASUS I 32
2. STUDI KASUS II 37
3. STUDI KASUS III 40

4. STUDI KASUS IV 52
5. STUDI KASUS V 58
6. STUDI KASUS VI 60
7. Studi Kasus VII 61
8. Studi Kasus VIII 62
9. Studi Kasus IX 64
10. Studi Kasus X 66
11. Studi Kasus XI 68
12. Studi Kasus XII 69
13. Studi Kasus XIII 70
14. Studi Kasus XIV 71
15. Studi Kasus XV 72
16. Studi Kasus XVI 73
17. Studi Kasus XVII 74
18. Studi Kasus XVIII 75
19. Studi Kasus XIX 77
20. Studi Kasus XX 78
21. Studi Kasus XXI 80
22. Studi Kasus XXII 81
23. Studi Kasus XXIII 83
24. Studi Kasus XXIV 84
25. Studi Kasus XXV 85
26. Studi Kasus XXVI 87
27. Studi Kasus XXVII 89
28. Studi Kasus XXVIII 92
29. Studi Kasus XXIX 93
30. Studi Kasus XXX 94
31. Studi Kasus XXXI 95
32. Studi Kasus XXXII 97
DAFTAR PUSTAKA 98
TENTANG PENULIS 101

BAB I PEMBUKUAN DAN KONSEP DASAR AKUNTANSI PAJAK

Dalam bab ini dijelaskan beberapa ketentuan terkait pembukuan dan konsep akuntansi pajak. Dalam Undang-undang Perpajakan lebih jelas diatur tentang pembukuan. Lebih lanjut dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perapajakan (UU KUP), pembukuan yang dimaksud adalah yang mengacu pada prinsip akuntansi yang lazim.

1. Pengertian Pembukuan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yangditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut (Pasal 1 angka 29 UU KUP).

2. **Pembukuan Perpajakan**

- Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan (Pasal 28 ayat (1) UU KUP)
- Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas (Pasal 28 ayat (5) UU KUP)
- Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan:
  a. stelsel pengakuan penghasilan;
  b. tahun buku;
  c. metode penilaian persediaan; atau
  d. metode penyusutan dan amortisasi.
- Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai. Termasuk dalam pengertian stetsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai

dalam bidang konstruksi dan metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu seperti *build operate and transfer* (BOT) dan real estat.

- Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut stelsei kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu. Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa, misalnya transportasi, hiburan, dan restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stetsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat pembayaran dari pelanggan diterima dan biaya-biaya ditetapkan pada saat barang, jasa, dan biaya operasi lain dibayar. Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:
  1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.
  2) Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak- hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.
  3) Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten). Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran.
- Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak (Pasal 28 ayat (6) UU KUP)
- Pembukuan harus diselenggarakn dengan cara atau system yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain (Penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP.

3. Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi yang ada karena adanya ketentuan Undang-undang Perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Tujuan akuntansi pajak adalah untuk menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Akuntansi surat pemberitahuan pajak (tax return) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahperpajakan dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan aan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax compliance*). Niswonger dan Fees (*Accounting Principles*, 2007).

4. Konsep Dasar Akuntansi Pajak

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan yaitu Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perapajakan (UU KUP), Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN), berikut ini adalah beberapa konsep akuntansi pajak:

- Pengukuran dalam Mata Uang (Pasal 28 ayat (4) UU KUP)
- Kesatuan Akuntansi (Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh)
- Konsep Kesinambungan (Pasal 25 ayat 1 UU PPh)
- Konsep Nilai Historis (Pasal 10 ayat (6) UU PPh)
- Periode Akuntansi (Pasal 28 ayat (6) UU KUP)
- Konsep Taat Asas (Pasal 28 ayat (5) UU KUP)
- Konsep Materialitas (Pasal 9 ayat 2 UU PPh)
- Konsep Konservatisme (Pasal 9 ayat (1) UU PPh)
- Konsep Realiasai (Pasal 4 ayat (1) UU PPh)
- Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan (Pasal 6 ayat (1) UU PPh)

BAB II AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

Akuntansi Pajak Penghasilan ini meliputi Pajak Penghasilan Pasal 21/26, 22, 23/26 dan Pasal 4 ayat (2). Beberapa transaksi yang terkait dengan akuntansi pajak penghasilan, adalah:

1. **PPh Pasal 21/26**

   Ketentuan mengenai saat terutangnya PPh Pasal 21/26 mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016:

   - PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
   - PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak.
   - Saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

2. **PPh Pasal 22**

   Saat Terutang PPh Pasal 22 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-34/PMK.010/2017):

   - Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang **terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.**
   - Dalam hal pembayaran Bea Masuk atas impor barang ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 **terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).**
   - Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), **terutang dan dipungut pada saat pembayaran.**
   - Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Badan usaha yang bergerak dalam bidang **usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif**, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan

hasil produksinya di dalam negeri, **terutang dan dipungut pada saat penjualan** (industri rokok mulai 1 Januari 2009 → tidak ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22, PMK 210/PMK.03/2008).

- Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya, **dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order).**

3. PPh Pasal 23/26

PPh Pasal 23/26 terutang objek pajak atas *passive income* berupa dividen, bunga, royalty, hadiah dengan tarif 15% dan atas sewa dan jasa lainnya dengan tarif 2%. Pada akuntansi komersial maupun akuntansi pajak yang terkait dengan pencatatan PPh Pasal 23 tidak terdapat perbedaan. Pihak yang dipotong PPh Pasal 23 yaitu Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap, yaitu pada saat: dibayarkan, tersedia untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayaran.

4. PPh Pasal 4 ayat (2)

Keterangan	Pihak Pemotong/Pemungut	Pihak yang Dipotong/dipungut
PPh Non Final	Dibukukan Sebagai Hutang Pajak (K)	Dibukukan Sebagai Pajak Dibayar Dimuka(D)
PPh Final	Dibukukan Sebagai Hutang Pajak (K)	Dibukukan Sebagai Beban Pajak Kini (D)

BAB III AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Secara umum PPN terkait dengan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Beberapa transaksi dibawah ini terkait dengan akuntansi PPN, antara lain:

- Transaksi penjualan BKP dan/atau JKP
- Transaksi pembelian dan pemberian potongan
- Transaksi pembelian secara kredit
- Transaksi pembayaran uang muka atas BKP
- Transaksi pembayaran pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean

Atas beberapa transaksi tersebut terdapat beberapa aspek perpajakan terkait PPN baik dari pihak Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual yang menyerahkan BKP/JKP dan pihak yang dipungut PPN, yaitu:

Keterangan	PKP Penjual (Yg menyerahkan BKP/JKP)	Yang Dipungut (Yg menerima BKP/JKP)
PPN dapat dikreditkan	Dicatat sebagai kewajiban (Pajak Keluaran)	Dicatat sebagai Piutang (Pajak Masukan)
PPN tidak dapat dikreditkan	Dicatat sebagai kewajiban (Pajak Keluaran)	Dibebankan sebagai biaya Atau Dikapitalisasi ke nilai Aset
Retur	Mengurangi/debet Kewajiban (Pajak Keluaran)	Mengurangi/kredit Piutang (Pajak Masukan)

Beberapa kemungkinan transaksi perolehan dan penyerahan BKP/JKP antara lain perolehan secara tunai dan secara kredit, terdapat diskon atau tidak, terjadinya retur barang atau tidak, terjadi penggantian Faktur Pajak yang mengakibatkan pembetulan SPT Masa PPN dan Faktur Pajak.

Pemahaman saat terutang dan saat paling lambat penerbitan Faktur Pajak, khususnya penerbitan e-Faktur merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembukuan terkait dengan PPN secara benar.

BAB IV REKONSILIASI FISKAL

1. Siklus Akuntansi Komersial dan Fiskal

Siklus akuntansi komersial laporan keuangan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dengan akuntansi pajak adalah adanya rekonsiliasi fiskal:
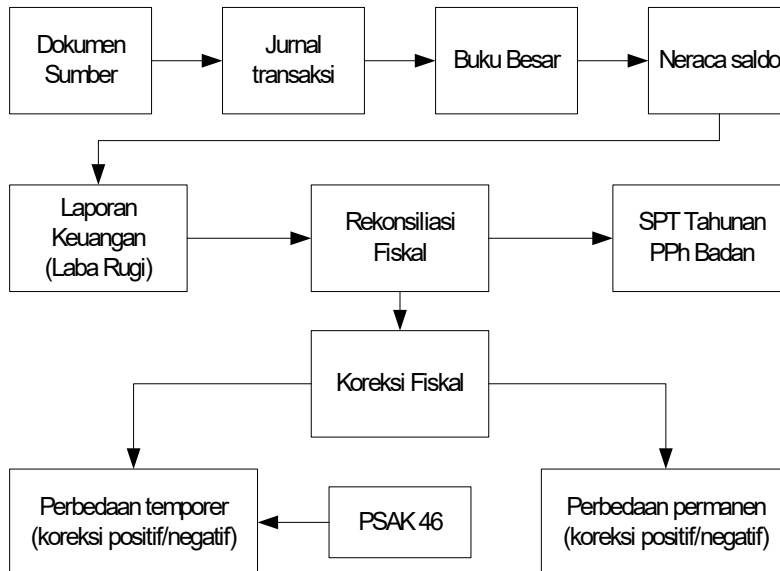
Gambar di atas menunjukkan adanya perbedaan permanen dengan perbedaan temporer dalam melakukan rekonsiliasi fiskal. Contoh perbedaan permanen adalah penghasilan final, penghasilan yang bukan objek pajak dan biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagai penghasilan. Sedangkan contoh perbedaan temporer adalah perbedaan pengukuran persediaan dan aktiva tetap.

2. Rekonsiliasi Fiskal atas Penghasilan

Keterangan	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
Penghasilan objek pajak & tidak dikenakan PPh Final	X.XXX			X.XXX
Penghasilan dikenakan PPh Final	X.XXX		X.XXX	0
Penghasilan Bukan Objek Pajak	X.XXX		X.XXX	0

3. Daftar Rekonsiliasi Fiskal Biaya Usaha

No	Jenis Biaya	Koreksi Fiskal	Keterangan
1	Alat Tulis Kantor	-	Ps. 6 ayat (1) huruf a
2	Antar Jemput Pegawai a. Bus/Minibus b. Sedan/Taksi	 - Positif	 PER-51/PJ./2009 pasal 10 PER-51/PJ./2009 pasal 10
3	Bonus a. Prestasi Kerja b. Pembagian Laba	 - Positif	 Objek PPh 21 Ps. 9 ayat (1) huruf a
4	Beasiswa Dalam Negeri atau Luar Negeri	-	Ps. 6 ayat (1) huruf g
5	Biaya kendaraan direktur	Positif	KEP-220/PJ/2002
6	Biaya Bunga a. Bank Dalam Negeri b. Bank Luar Negeri c. Untuk investasi saham	 - - Positif	 SE-46/PJ.4/1995 SE-46/PJ.4/1995 penjelasan Ps. 6 ayat (1) huruf a
7	Entertainment a. Daftar Nominatif b. Tanpa Daftar nominatif	 - Positif	 SE-27/PJ.22/1986 SE-27/PJ.22/1986
8	Gaji Pokok	-	Objek PPh 21, Ps. 6 ayat (1) huruf a
9	Iuran Pensiun	-	Bukan Objek PPh 21, Ps. 6 ayat (1) huruf a
10	Jaminan Keselamatan Kerja & Jaminan Kematian	-	Objek PPh 21, Ps. 6 ayat (1) huruf a
11	Jaminan Hari Tua	-	Bukan Objek PPh 21, Ps. 6 ayat (1) huruf a
12	Kerugian Piutang a. Penyisihan b. Nyata-nyata tidak dapat ditagih (sesuai PMK-207/PMK.010/2015) c. Tidak sesuai PMK-207/PMK.010/2015	 Positif - Positif	 Ps. 9 ayat (1) huruf c SE-62/PJ/2010 SE-62/PJ/2010
13	Keselamatan Kerja	-	Ps. 6 ayat (1) huruf a
14	Karangan Bunga	Positif	Tidak berhubungan dengan 3M
15	Makan/minum Pegawai a. Di tempat Kerja b. Di restoran	 - Positif	 PMK-167/PMK.03/2018 natura/kenikmatan, Ps.9 (1)e
16	Materai	-	Ps. 6 ayat (1) huruf a

No	Jenis Biaya	Koreksi Fiskal	Keterangan
17	Olahraga Pegawai	Positif	natura/kenikmatan, Ps.9 (1)e
18	Pengobatan a. Tunjangan b. Penggantian c. Cuma-Cuma d. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan	 - - Positif -	 Objek PPh 21 Objek PPh 21 Ps. 9 ayat (1) huruf e Ps. 6 ayat (1) huruf a
19	Perjalanan a. Pegawai/dinas b. Cuti Pegawai c. Pemegang Saham d. Pejabat	 - Positif Positif Positif	 Ps. 6 ayat (1) huruf a natura/kenikmatan, Ps.9 (1)e Ps. 9 ayat (1) huruf b Ps. 9 ayat (1) huruf i
20	PPh Pasal 21 a. Tunjangan b. Ditanggung Perusahaan	 - Positif	 Objek PPh 21 natura/kenikmatan, Ps.9 (1)e
21	Pembagian Beras	Positif	natura/kenikmatan, Ps.9 (1)e
22	Promosi	-	Ps. 6 ayat (1) huruf a
23	Pameran	-	Ps. 6 ayat (1) huruf a
24	Prangko	-	Ps. 6 ayat (1) huruf a
25	Penelitian a. dilakukan di Indonesia b. dilakukan di Luar Negeri	 - Positif	Ps. 6 ayat (1) huruf a Ps. 6 ayat (1) huruf f Ps. 6 ayat (1) huruf f
26	*Professional fee*-Dalam Negeri	-	Ps. 6 ayat (1) huruf a
27	*Professional fee*-Luar Negeri	-	Ps. 6 ayat (1) huruf a
28	Pajak Daerah	-	Penjelasan Ps. 6 ayat (1) huruf a, SE-02/PJ.42/2002
29	Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan	-	PP 45 Tahun 2019
30	PPh Final	Positif	Ps. 9 ayat (1) huruf h
31	Parsel Lebaran	Positif	tidak berhubungan dengan 3M
32	Pulsa/Handphone Pegawai	Positif (50%)	KEP-220/PJ/2002
33	Penyusutan a. Komputer b. Handphone	 - disusutkan hanya 50% secara fiskal	 Kelompok 1 Kelompok 1, KEP-220/PJ/2002

No	Jenis Biaya	Koreksi Fiskal	Keterangan
	c. Kendaraan Operasi d. Sedan e. Inventaris	disusutkan seluruhnya disusutkan hanya 50% secara fiskal -	Kelompok 2, KEP-220/PJ/2002 Kelompok 2, KEP-220/PJ/2002
34	Retribusi Daerah	-	penjelasan Ps. 6 ayat (1) huruf a, SE-02/PJ.42/2002
35	Rugi Kurs	-	Pasal 6 ayat (1) huruf e
36	Rekreasi/piknik	Positif	natura/kenikmatan, Ps.9 (1)e
37	Seragam a. Pabrik b. Satpam c. Hansip d. Staff	 - - - Positif	 PER-51/PJ./2009 pasal 10 PER-51/PJ./2009 pasal 10 PER-51/PJ./2009 pasal 10 natura/kenikmatan, Ps.9 (1)e
38	Sanksi Administrasi Pajak	Positif	Pasal 9 ayat (1) huruf k
39	Sewa Kantor	-	Ps. 6 ayat (1) huruf a
40	Seminar	-	Ps. 6 ayat (1) huruf g
41	Sewa Rumah Pegawai a. Tunjangan Sewa Rumah b. Tidak diberikan tunjangan sewa rumah	 - Positif	 Objek PPh 21 natura/kenikmatan, Ps.9 (1)e
42	Sumbangan a. Penelitian & Pengembangan b. fasilitas pendidikan c. Pembinaan olah raga d. biaya pembangunan infrastruktur sosial	 - - - -	 Ps.6 ayat (1) huruf j Ps.6 ayat (1) huruf l Ps.6 ayat (1) huruf m Ps.6 ayat (1) huruf k
43	Telepon, fax	-	Ps. 6 ayat (1) huruf a
44	*Training* Dalam Negeri atau Luar Negeri	-	Ps. 6 ayat (1) huruf g
45	Tunjangan Aktifitas	-	Objek PPh 2, Ps. 6 ayat (1) huruf a
46	Tunjangan Hari Raya	-	Objek PPh 21, Ps. 6 ayat (1) huruf a

BAB V AKUNTANSI *LEASING*

1. Klasifikasi Sewa

Sewa dalam akuntansi diatur dalam Panduan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 30. Berdasarkan PSAK tersebut sewa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- Sewa pembiayaan *(Finance Lease)* adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu asset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan.
- Sewa Operasi (*Operating Lease)* adalah sewa selain sewa pembiayaan. Pada sewa operasi, perusahaan sewa membeli barang modal dan selanjutnya disewakan kepada penyewa guna usaha.

2. Ketentuan Sewa secara Komersial

Uraian	**Sewa Pembiayaan**		**Sewa Operasi**	
	Lessee	***Lessor***	***Lessee***	***Lessor***
Pengakuan Awal	Aset Liabilitas	Aset (Piutang)	-	-
Pengukuran selanjutnya	- Beban Penyusutan - Beban Bunga	- Pendapatan sewa pembiayaan - Pendapatan Bunga	Beban Sewa	Pendapatan Sewa

3. Ketentuan PPh atas Sewa

Uraian	**Sewa Pembiayaan**	**Sewa Operasi**
Objek PPh	- Sebagian pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha; - Imbalan jasa SGU adalah bagian dari pembayaran SGU yang diperhitungkan sebagai pendapatan SGU bagi *Lessor*	Seluruh pembayaran yang diterima *lessor* dari *lessee*
Penyusutan	- *Lessor* tidak boleh menyusutkan - *Lessee* tidak melakukan penyusutan atas barang modal yang disewaguna usahakan, sampai saat *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli	*Lessor* mebebankan biaya penyusutan atas barang modal

Uraian	Sewa Pembiayaan	Sewa Operasi
	- Setelah *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, *lessee* melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal tersebut	
Pembayaran Sewa	Merupakan biaya yang dapat dikurangkan (kecuali pembebasan atas tanah)	Merupakan biaya yang dapat dikurangkan
PPh Pasal 23	Terutang	Terutang (dipotong *lessee*)
Lainnya	*Lessor* dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto setinggi-tingginya sebesar 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa guna usaha dengan hak opsi. Piutang sewa guna usaha adalah jumlah seluruh sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha	

4. Ketentuan PPN atas sewa

Uraian	Sewa Pembiayaan	Sewa Operasi
BKP berasal dari pemasok	- Penyerahan yang terjadi adalah penyerahan dari pemasok ke *lessee* - *Lessor* hanya menyerahkan jasa pembiayaan yang bukan objek PPN - PKP Pemasok menerbitkan Faktur Pajak atas nama *lessee* - DPP yang dicantumkan sebesar harga jual pemasok	Ketentuan umum
BKP berasal dari persediaan lessor	- *Lessor* menyerahkan BKP dan jasa pembiayaan - Atas penyerahan BKP tetap terutang PPN - *Lessor* harus dikukuhkan sebagai PKP apabila memenuhi ketentuan - DPP yang dicantumkan dalam Faktur Pajak tidak termasuk unsur bunga yang diminta atau seharusnya diminta oleh *lessor*	

5. Aspek Pajak atas Sewa

Jenis Transksi	Sewa Operasi		Sewa Pembiayaan	
	Lessor	***Lessee***	***Lessor***	***Lessee***
Penyerahan Awal	-	PPN, PPh Ps. 23/4(2)	-	-
Angsuran/Sewa	-	PPN, PPh Ps. 23/4(2)	-	Koreksi Negatif
Biaya Penyusutan	Tidak ada koreksi	-	-	Koreksi Fositif
Akhir Masa Sewa	-	-	PPN, gain (penyerahan)	-

Sumber:

a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.04/1991

b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 129/PJ/2010

BAB VI REVALUASI ASET TETAP

Perilaku akuntansi tentang revaluasi aset tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 diatur, antara lain:

- Revaluasi aset tetap harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari pemerintah.
- Nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali sesuai nilai pasar atau nilai wajar aset yang bersangkutan.
- Revaluasi aset tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.
- Selisih antara nilai pengalihan aset tetap perusahaan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan undang-undang Pajak Penghasilan.
- Selisih lebih revaluasi aset tetap perusahaan di atas nilai sisa komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan harus dibukukan dalam Laporan Posisi Keuangan pada ekuitas dengan nama "Selisih Lebih Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan tanggal …"
- Apabila revaluasi asset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dan memenuhi syarat ketentuan, maka terdapat PPh Final dengan perhitungan:

  PPh Final atas revaluasi asset tetap= 10% x selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan diatas nilai sisa buku fiskal semula.
- **Apabila hasil revaluasi di bawah dari nilai tercatat**, maka secara akuntansi akan di catat pada laba rugi (Jika tidak memiliki saldo surplus revaluasi akibat revaluasi periode-periode sebelumnya).
- Apabila penyebab hasil revaluasi dibawah nilai tercatat ini disebabkan sesuatu yang bersifat estimasi dan belum terjadi, maka dilakukan koreksi fiskal positif dan pada saat estimasi tersebut benar-benar terjadi dilakukan koreksi fiskal negatif.

BAB VII AKUNTANSI KONTRAK KONSTRUKSI

Panduan Standard Akuntasi Keuangan yang mengatur tentang Kontrak Konstruksi adalah PSAK Nomor 34. Sedangkan dalam ketetuan perpajakan masih menggunakan istilah jasa konstruksi. Beberapa ketentuan perpajakan terkait jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
- Peraturan Menteri Keuangan Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tanggal 20 Desember 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

Beberapa batasan yang perlu dipahami dalam pengenaan Pajak Penghasilan usaha jasa konstruksi adalah:

- Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
- Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).
- Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan.

- Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
- Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya .
- menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.
- Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha jasa konstruksi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat Final.
- Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak penyedia jasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009, sebagai berikut:
  1) 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi;
  2) 2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi; atau
  3) 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi.

BAB VIII KUMPULAN SOAL LATIHAN

Soal Pilihan Ganda:

Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Berikut ini adalah Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan namun wajib melakukan pencatatan untuk tahun pajak 2017 sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU KUP dan Pasal14 ayat (2) UU PPh:
   a. PT Maju Bersama, apabila diketahui peredaran usaha pada tahun 2016 sebesar Rp3.500.000.000
   b. PT Desaku Maju, apabila diketahui peredaran usaha pada tahun 2016 sebesar Rp4.900.000.000
   c. Tuan Budi seorang pedagang bahan bangunan dengan peredaran usaha pada tahun 2016 sebesar Rp5.000.000.000
   d. Tuan Andi seorang pengusaha konveksi, apabila diketahui peredaran usaha pada tahun 2016 sebesar Rp3.500.000.000

2. Perusahaan menggunakan sistem periodik dalam menghitung harga pokok perolehan. Pada tanggal 31 Desember 2017, terdapat pembelian barang sebesar Rp2.500.000.000. Pembelian tersebut belum dijurnal dan belum dimasukkan dalam persediaan. Bila kesalahan tersebut diperbaiki, akan mengakibatkan :
   a. Penghasilan Kena Pajak lebih besar
   b. Penghasilan Kena Pajak tetap
   c. Penghasilan Kena Pajak lebih kecil
   d. Pembelian dikoreksi

3. Sejak tahun 2013, PT Kuala Utama diijinkan menggunakan tahun buku dengan periode dari 1 Juli s.d. 30 Juni tahun berikutnya. Untuk tahun pajak 2016, PT Kuala Utama harus menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan paling lambat tanggal:
   a. 31 November 2017
   b. 30 Oktober 2016
   c. 31 Oktober 2017
   d. 30 Oktober 2017

4. PT ABC sebagai distributor kertas membeli produk kertas sebesar Rp330.000.000 (termasuk PPN) dari perusahaan industri kertas PT BAC pada tanggal 1 April 2018. Pencatatan PPh Pasal 22 (tarif 0,1 %) oleh PT BAC adalah:
   a. PPh Pasal 22 diterima dimuka di debit sebesar Rp300.000
   b. PPh Pasal 22 dibayar dimuka di debit sebesar Rp300.000
   c. Utang PPh Pasal 22 di kredit sebesar Rp300.000
   d. Beban PPh Pasal 22 di kredit sebesar Rp300.000

5. Pada tanggal 31 Desember 2016, PT Sinar Terang (PKP) membayar royalty atas penggunaan merk dagang dengan sebuah perusahaan di Jerman bernama Berger Co. dengan

nilai kontrak US $3,000. Apabila diketahui kurs tengah BI dan kurs KMK pada tanggal31 Desember 2016 adalah Rp10,000 dan Rp10.100, maka PT Sinar terang akan menjurnal (asumsi: tidak ada P3B antara Indonesia-Jerman):

a. Mendebit akun beban royalti sebesar Rp30.300.000
b. Mengkredit akun utang PPh Pasal 26 Rp6.000.000
c. Mengkredit akun kas Rp23.940.000
d. jawaban a, b, c salah

6. PT ABC adalah sebuah perusahaan dagang. Berikut hal-hal yang menimbulkan koreksi fiskal negatif, kecuali
   a. Biaya berupa cadangan kerugian piutang
   b. Penghasilan berupa sewa ruangan
   c. Penghasilan berupa sewa mobil
   d. Keuntungan penjualan saham di Bursa Efek Indonesia

7. Pada Laporan Laba Rugi PT ABC tahun 2013 terdapat beban sanksi administrasi pajak sebesar Rp25.000.000. Atas beban tersebut dilakukan koreksi fiskal ...
   a. Positif
   b. Negatif
   c. Beda waktu
   d. Beda sementara

8. 8. CV Salim memiliki usaha minimarket Indoapril. Setiap bulan CV Salim membayar royalti ke PT Indoapril. Berikut pernyataan yang benar ...
   a. PT Indoapril mencatat kredit akun Utang PPh Pasal 23
   b. PT Indoapril mencatat debit akun PPh Pasal 23 diterima dimuka
   c. CV Salim mencatat kredit akun Utang PPh Pasal 23
   d. CV Salim mencatat debit akun PPh Pasal 23 dibayar dimuka

9. Pada tanggal 25 Oktober 2018, PT Utama Sentosa membayar gaji kepada karyawannya sebesar Rp8.000.000 dengan PPh Pasal 21 Terutang Rp125.000 ditanggung perusahaan, maka jurnal yang dibuat bagian akuntansi:
   a. Mendebit akun beban gaji Rp8.000.000 dan mengkredit akun utang PPh Pasal 21 Rp125.000
   b. Mendebit akun beban PPh Pasal 21 Rp125.000 dan mengkredit akun kas/bank Rp7.875.000
   c. Mendebit akun beban gaji Rp8.000.000 dan mengkredit akun kas Rp7.875.000
   d. Tidak ada jawaban yang benar

10. Di bawah ini merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali:
    a. Premi asuransi kesehatan yang dibayarkan oleh PT ABC untuk Tn. A dan atas nilai premi tersebut ditambahkan sebagai penghasilan bagi Tn.A
    b. Gaji yang dibayarkan kepada Tn. B sebagai pemilik CV Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perdagangan alat tulis kantor.
    c. Piutang tak tertagih dari debitur kecil yang sudah dibebankan sebagai biaya dalam laporan keuangan komersial PT DEF dan daftarnya sudah diserahkan ke DJP.

d. Biaya iklan di media televisi yang dikeluarkan oleh PT XYZ terkait dengan produk baru yang dikeluarkan, atas biaya iklan tersebut telah dibuatkan daftar nominatifnya.

11. Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Lessor dalam sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebagai berikut, kecuali ...
    a. Imbalan jasa sewa guna usaha merupakan penghasilan bagi lessor
    b. Lessor boleh menyusutkan asset yang di-sewa guna usahakan
    c. Lessor dapat melakukan pencadangan penghapusan piutang ragu-ragu
    d. Dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tidak dibebani untuk menutup kerugian piutang tak tertagih maka sisanya dihitung sebagai penghasilan bagi lessor

12. Secara fiskal, Lessor hanya diperkenankan memberikan pembiayaan barang modal kepada lessee dengan syarat sebagai berikut, kecuali ...
    a. Lessee mempunyai NPWP
    b. Lessee mempunyai kegiatan usaha
    c. Lessee mempunyai pekerjaan bebas
    d. Lessee merupakan Wajib Pajak Badan

13. Pada tanggal 1 Januari 2017, PT Budi Pekerti membayar angsuran sewa guna usaha dengan hak opsi sebesar Rp60.000.000 kepada PT Stancorp Finance. Pembayaran tersebut terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp40.981.000 dan biaya bunga Rp19.019.000. Berdasarkan ketentuan perpajakan, manakah pernyataan berikut yang benar:
    a. Atas biaya bunga dan angsuran sebesar Rp60.000.000 tersebut tidak boleh menjadi biaya fiskal bagi PT Budi Pekerti.
    b. Penghasilan yang menjadi objek pajak bagi PT Stancorp Finance adalah sebesar Rp60.000.000.
    c. PT Budi pekerti diperkenankan melakukan koreksi fiskal negatif terhadap beban bunga sebesar angsuran pokok yang dibayarkan.
    d. PT Budi Pekerti harus memotong PPh Pasal 23 atas beban bunga yang dibayarkan kepada PT Stancorp Finance.

14. Berdasarkan PSAK 30 mengenai akuntansi sewa, ketentuan mengenai penyusutan atas aset sewaan diatur sebagai berikut. kecuali:
    a. Untuk jenis sewa pernblayaan, beban penyusutan aset sewaan hanya boleh dilakukan oleh pihak lessee.
    b. Hanya lessor yang berhak membebankan penyusutan aset sewaan yang dilakukan dengan jenis sewa operasi
    c. Kebijakan atas masa manfaat penyusutan aset sewaan untuk sewa operasi harus konsisten dengan kebijakan penyusutan normal untuk aset sejenis.
    d. Baik lessor maupun lessee tidak diperkenankan membiayakan beban penyusutan atas aset sewaan.

15. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar terkait perlakuan beban penyusutan aset sewa guna usaha dengan hak opsi berdasarkan ketentuan perpajakan:
    a. Hanya lessee yang boleh membebankan biaya penyusutan fiskal

b. Hanya lessor yang boleh membebankan biaya penyusutan fiskal
c. Lessee maupun lessor diperbolehkan membebankan biaya penyusutan fiskal
d. Terutang Pajak Pertambahan Nilai

16. PT Sarmili Damai mengimpor sebuah mesin pengolah Iimbah dengan nilai elF USD 10.000.00. Atas impor tersebut dikenakan bea masuk 20%. PPh Pasal 22 sebesar 2.5% dan PPN 10%. Berapakah nilai perolehan mesin yang harus dicatat oleh PT Sarmili Damai apabila kurs tengah BI dan kurs KMK pada saat impor diketahui masing masing Rp10.000.00 dan Rp1 0.1 00.00 per USD:
    a. Rp120.100.000
    b. Rp135.000.000
    c. Rp121.200.000
    d. Jawaban a. b dan c tidak benar

17. PT A melakukan pertukaran sebuah truk Hino miliknya dengan sebuah truk Fuso yang dimiliki oleh PT B. dari data sebagai berikut, berapakah nilai keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi pertukaran truk tersebut:

	PT A (Hino)	PT B (Fuso)
Nilai buku	Rp120.000.000	Rp150.000.000
Nilai pasar	Rp80.000.000	Rp160.000.000

    a. PT A mencatat kerugian sebesar Rp40.000.000
    b. PT B mencatat keuntungan sebesar Rp10.000.000
    c. PT A mencatat keuntungan sebesar Rp40.000.000
    d. Tidak ada keuntungan/kerugian yang timbul atas pertukaran aktiva sejenis.

18. PT Masih Kangen melakukan penjualan mesin bekas produksinya dengan nilai buku fiskal Rp1.000.000.000 kepada PT Kenangan Mantan. Meskipun harga pasaran mesin tersebut Rp1.300.000.000. namun mengingat PT Kenangan Mantan merupakan anak usaha PT Masih Kangen (kepemilikan 40%) maka mesin tersebut dijual dengan harga Rp1.100.000.000.00. Berdasarkan ketentuan perpajakan. manakah penyataan di bawah ini yang benar terkait PT Masih Kangen:
    a. Mencatat keuntungan fiskal penjualan mesin sebesar Rp100.000.000
    b. Mencatat kerugian fiskal penjualan mesin sebesar Rp200.000.000 karena menjual di bawah harga pasar.
    c. Mengakui keuntungan fiskal penjualan mesin sebesar Rp300.000.000
    d. Harga penyerahan sebesar Rp1.100.000.000 sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan.

19. PT Sepatu Merah menyerahkan sebuah mesin bekas kepada PT Tas Merah sebagai pengganti setoran modal. Pada saat pengalihan diketahui bahwa nilai buku mesin Rp100.000.000, dan nilai pasarnya Rp120.000.000, sedangkan nilai nominal saham Rp100.000.000, dan nilai pasar saham Rp105.000.000. Berdasarkan ketentuan perpajakan, berapakah nilai pengalihan mesin tersebut:
    a. Sesuai nilai buku mesin yaitu Rp100.000.000
    b. Sesuai harga pasar mesin, yaitu Rp120.000.000
    c. Sesuai harga nominal saham, yaitu Rp100.000.000
    d. Sesuai harga pasar saham, yaitu Rp105.000.000

20. Pernyataan di bawah ini merupakan beberapa alasan mengapa sebuah perusahaan melakukan revaluasi aset tetap, kecuali:
    a. Nilai aset tetap disajikan dalam nilai yang wajar.
    b. Dapat mengatur pembayaran pajak di masa depan.
    c. Nilai ekuitas menjadi meningkat, sehingga meningkatkan nilai perusahaan apabila akan melakukan initial public offering (IPO).
    d. Nilai aset tetap disajikan sesuai nilai perolehan sehingga laporan keuangan lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

21. Berikut ini merupakan beberapa perbedaan perlakuan revaluasi aset tetap antara akuntansi komersial dan perpajakan, kecuali:
    a. Ketentuan perpajakan mengatur bahwa revaluasi aset harus dilakukan untuk seluruh aset pada kelompok yang sarna.
    b. Akuntansi komersial mengijinkan revaluasi aset dilakukan secara regular untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada tanggal neraca.
    c. Ketentuan perpajakan mengatur bahwa revaluasi aset tetap tidak dapat dilakukan kernbali sebelum lewat jangka waktu lima tahun sejak revaluasi aset tetap sebelumnya.
    d. Akuntansi komersial mengijinkan revaluasi aset dilakukan baik untuk aset yang menghasilkan selisih lebih maupun selisih kurang dari nilai buku

22. Berikut ini beberapa ketentuan perpajakan mengenai penilaian kembali aktiva tetap seperti yang diatur dalam PMK nomor 79/PMK.03/2008 dengan PMK nomor 191/PMK.010/2015, kecuali:
    a. Terdapat perbedaan tarif pajak atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap di antara kedua peraturan tersebut.
    b. Perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat diperkenankan melakukan penilaian kembali aktiva tetap berdasarkan PMK nomor 79/PMK.03/2008.
    c. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan diperkenankan melakukan penilain kembali aktiva tetap berdasarkan PMK nomor 1911PMK.010/2015.
    d. Terdapat sanksi atas pengalihan aktiva tetap yang dilakukan setelah melakukan penilain kernbali aktiva tetap sebelum memenuhi jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.

23. PT Benar Salah melakukan penilaian aktiva tetap untuk tujuan perpajakan pada tanggal 31 Desember 2015 untukdua mesin pabrik, dari data sebagai berikut berapakah PPh Final atas penilaian kembali aktiva yang harus dibayar oleh PT Benar Salah:

No.	Mesin	Nilai sisa buku fiskal	Nilai hasil penilaian kembali	Selisih
1.	A	Rp60.000.000	Rp100.000.000	Rp40.000.000
2.	B	Rp100.000.000	Rp80.000.000	(Rp20.000.000)
Jumlah		Rp160.000.000	Rp180.000.000	Rp20.000.000

    a. Rp600.000
    b. Rp1.200.000
    c. Rp2.000.000

d. Rp1.600.000

24. Dari data persediaan akhir yang dimiliki oleh PT Lima Lima berikut, berdasarkan ketentuan perpajakan, berapa nilai persediaan akhir barang B yang digunakan oleh PT Lima-Lima untuk menghitung harga pokok penjualannya?

No.	Jenis Barang	Harga Perolehan (Rp)	Harga Pasar (Rp)	LOCOM (Rp)
1.	A	100.000	125.000	100.000
2.	B	150.000	125.000	125.000
3.	C	175.000	150.000	150.000

a. Rp375.000
b. Rp400.000
c. Rp425.000
d. Rp150.000

25. PT Keren menggunakan sistem pencatatan perpetual untuk mencatat persediaannya. Berikut ini merupakan jurnal yang harus dibuat apabila PT Keren menerima retur atas penjualan kredit yang sudah dilakukan sebelumnya, kecuali:
a. Mengkredit akun piutang usaha
b. Mengkredit akun harga pokok penjualan
c. Mendebit akun sales return and allowance
d. Mendebit akun persediaan

26. Dari data pembelian atas barang dagangan yang dilakukan oleh PT Budi Pekerti selama tahun 2017, hitunglah nilai harga pokok penjualan dan nilai persediaan akhir dengan metode FIFO apabila diketahui bahwa PT Budi Pekerti melakukan penjualan sebanyak 3000 Unit selama tahun 2017 dan tidak mempunyai saldo persediaan awal tahun 2017:

Tanggal	Unit dibeli	Harga per unit (Rp)	Nilai beli (Rp)
5/1/2017	100	100	10.000
20/6/2017	1.000	110	110.000
25/8/2017	2.000	90	180.000
20/12/2017	500	120	60.000
Total	3.600		360.000

a. Rp295.000 dan Rp65.000
b. Rp291.000 dan Rp69.000
c. Rp300.000 dan Rp60.000
d. Rp296.000 dan Rp64.000

27. PT Sernoga Berhasil menggunakanjasa dari PT Hanya Karnu (belum ber-NPWP) untuk memperbaiki bangunan pabrik miliknya yang retak akibat gernpa burni. Nilai kontrak atas perbaikan tersebut Rp800.000.000. PT Hanya Karnu merupakan perusahaan yang ruang lingkup usahanya bukan di bidang konstruksi. Pernotongan pajak oleh PT Semoga Berhasil adalah
a. PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp16.000.000
b. PPh Final Pasal4 ayat (2) sebesar Rp32.000.000
c. PPh Pasal 23 sebesar Rp16.000.000
d. PPh Pasal23 sebesar Rp32.000.000

28. Bagaimanakah perrakuan perpajakan atas nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar sepenuhnya oleh pengguna jasa dan telah dimasukkan sebagai piutang yang tidak dapat ditagih:
    a. Tetap terutang PPh Final yang harus disetor sendiri oleh pemberi jasa
    b. Dikenakan pajak penghasilan dengan tarif umum.
    c. Tidak terutang PPh Final
    d. Jawaban a, b dan c tidak benar

29. Bagaimana perlakuan perpajakan atas keuntungan selisih kurs terkait nilai kontrak yang diperoleh oleh wajib pajak yang ruang Iingkup usahanya sebagai pengusaha jasa konstruksi:
    a. Dicatat sebagai pendapatan lain-lain yang dikenakan PPh umum.
    b. Bukan merupakan penghasilan kena pajak
    c. Ketentuan perpajakan tidak mengatur hal tersebut
    d. Tetap dipotong PPh Final Pasal4 ayat (2) sebagai bagian nilai kontrak.

30. PT Pondok Jaya merupakan wajib pajak yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi spesifikasi pelaksana konstruksi dengan kualifikasi menengah. Pada tanggal 1 Juni 2017 menerima pembayaran dari Tuan Amri (seorang pengangguran tidak memiliki npwp) sebesar Rp100.000.000 atas pembangunan rumahnya. Berikut yang sesuai dengan ketentuan perpajakannya:
    a. Tuan Amri memotong pajak Rp3.000.000
    b. PT Pondokjaya setor pajak Rp4.000.000
    c. PT Pondok jaya setor pajak Rp3.000.000
    d. PT Pondok jaya setor pajak Rp6.000.000

31. Bagaimanakah perlakuan perpajakan atas pajak yang dipotong di luar negeri atas penghasilan yang diterima wajib pajak bidang usaha jasa konstruksi atas pekerjaan yang dilakukan di luar negeri:
    a. Tidak dapat dikreditkan dengan penghasilan di dalam negeri karena penghasilannya bersifat final.
    b. Dapat dikreditkan dengan pajak terutang di dalam negeri.
    c. Dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak
    d. Ketentuan perpajakan tidak mengatur hal tersebut.

32. Berikut ini merupakan bentuk kombinasi bisnis yang menurut PMK Nomor 43/PMK.03/2008 diperbolehkan menggunakan metode nilai sisa buku (pooling of interest), kecuali:
    a. Peleburan usaha.
    b. Penggabungan usaha.
    c. Pengambilalihan usaha
    d. Pemekaran usaha.
33. Berdasarkan PMK nomor 521PMK.010/2017,surat permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka kombinasi bisnis harus dilakukan oleh pihak yang menerima harta, kecuali untuk surat permohonan diajukan oleh pemberi harta.
    a. Peleburan usaha.
    b. Penggabungan usaha.

c. Pengambilalihan usaha
d. Pemekaran usaha.

34. Berdasarkan PMK nomor 52/PMK.010/2017, amortisasi dan penyusutan atas harta yang diterima dalma rangka kombinasi bisnis dilakukan berdasarkan, kecuali:
    a. Nilai buku pada pembukuan pihak yang mengalihkan harta.
    b. Sisa masa mantaat sesuai dengan pembukuan pihak pengalih harta.
    c. Masa mantaat diulang berdasarkan kelompok harta yang dialihkan.
    d. Jawaban a, b dan c tidak benar.

35. Tuan Aman, wajib pajak orang pribadi dalam negeri, menerima dividen sebesar Rp1.000.000.000 atas kepemilikan saham sebanyak 40% di PT Cikal Bakal, bagaimanakah ketentuan perpajakan atas dividen yang diterima Tuan Aman:
    a. Dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp150.000.000.
    b. Dipotong PPh Pasal17 ayat 2b sebesar Rp100.000.000.
    c. Dipotong PPh Pasal17 ayat 2c sebesar Rp100.000.000.
    d. Bukan objek pajak karena mempunyai kepemilikan di atas 25%.

36. Saat diperolehnya deemed dividen apabila badan usaha usaha luar negeri (BULN) nonbursa terkendali langsung tidak mempunyai kewajiban pelaporan SPT atau tidak ada batas waktu penyampaian SPT adalah:
    a. Akhir bulan keempat setelah tahun pajak yang bersangkutan berakhir.
    b. Akhir bulan ketujuh setelah tahun pajak yang bersangkutan berakhir.
    c. Bersamaan dengan pelaporan SPT wajib pajak dalam negeri yang mempunyai pengendalian langsung.
    d. Jawaban a, b dan c tidak benar.

37. Pada tahun 2017, PT Inti membagikan dividen dari laba ditahan sebesar Rp5.000.000.000 kepada PT Swadaya (pemegang saham 80% di PT Inti) dari laba setelah Pajak Penghasilan. Perlakuan PPh atas pembagian dividen tersebut
    a. PT Swadaya dikenai PPh tidak final 15%
    b. Secara tiskal PT Inti dapat membiayakan dividen yang dibagikan tersebut
    c. Bagi PT Swadaya bukan merupakan objek PPh
    d. PT Inti memotong PPh Pasal 23

38. PT Jaya Raya menyewakan ruangan kantor dikenakan PPh Final sejak tahun 2001. Tahun 1999, PT Jaya Raya membeli tanah seharga Rp1.000.000.000 dan Gedung perkantoran selesai dibangun pada akhir tahun 2000 seharga RpS.OOO.OOO.OOO. Mulai digunakan dan disewakan awal tahun 2001, pada tanggal 2 Januari 2018, tanah dan gedung perkantoran dijual tunai seharga Rp20.000.000.000. Berapakah keuntungan penjualan tanah dan bangunan yang dikecualikan dalam Penghitungan Penghasilan kena Pajak tahun 2018
    a. Rp5.100.000.000
    b. Rp1.900.000.000
    c. Rp20.000.000.000
    d. Rp18.100.000.000

39. PT Garmen Jaya adalah PKP industri garmen. Dalam bulan Mei 2018 sedang membangun sendiri sebuah gedung untuk outlet seluas 480 m2. Dalam bulan Mei 2018 dikeluarkan biaya sebesar Rp80.000.000 termasuk PPN atas pembelian bahan bangunan sebesar Rp6.000.000. Sehubungan dengan itu PT Garmen Jaya:
    a. Dikenai PPN 10% x Rp80.000.000 karena PT Garmen Jaya adalah PKP
    b. Dikenai PPN 10% x 20% x (Rp80.000.000 - Rp6.000.000) meskipun dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
    c. Dikenai PPN 10% x 40% x (Rp80.000.000 - Rp6.000.000) meskipun dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
    d. Dikenai PPN 10% x 20% x Rp80.000.000 meskipun dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

40. Pada tanggal 1 Januari 2018 perusahaan dagang PT AJP masih memiliki barang dagangan yang dihitung dengan metode FIFO sebanyak 4.000 unit @Rp20.000. Selama tahun 2018 melakukan transaksi yang berhubungan dengan persediaan yaitu tanggal 20 Februari melakukan pembelian 1.000 unit @Rp24.000; pada tanggal 20 Mei melakukan penjualan 2.000 unit @Rp26.000; tanggal 20 Agustus melakukan pembelian 1.400 unit @Rp28.000; tanggal 20 September melakukan pembelian 1.200 unit @Rp24.000tanggaI30 September melakukan penjualan 3.300 unit@Rp28.000; tanggal 30 Desember melakukan penjualan 2.000 unit @Rp30.000. Dari data tersebut di atas besarnya persediaan akhir adalah:
    a. Rp9.000.000
    b. Rp7.200.000
    c. Rp6.000.000
    d. Jawaban a, b dan c tidak benar

41. Pada tanggal 31 Desember 2018, PT INDAH mengajukan permohonan untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Aktiva yang akan di nilal kembali berupa mesin produksi yang termasuk dalam kelompok 2 (masa manfaat secara komersial sama dengan fiskal). Mesin diperoleh pada Juli 2016 dengan harga perolehan Rp1.000.000.000 dan dengan nilai penilaian kembali sebesar Rp1.500.000.000. Berapakah besarnya Pajak Penghasilan atas penilaian kembali mesin tersebut?
    a. Rp81.250.000
    b. Rp24.375.000.
    c. Rp32.500.000.
    d. Rp48.750.000.

42. Pada Laporan Laba Rugi PT ABC tahun 2017 terdapat nilai persediaan akhir di HPP sebesar Rp22.200.000, sedangkan nilai persediaan akhir menurut fiskal sebesar Rp24.800.000. Atas perbedaan nilai ini PT ABC akan melakukan koreksi fiskal ...
    a. Positif di persediaan akhir sebesar Rp2.600.000
    b. Negatif di persediaan akhir sebesar Rp2.600.000
    c. Negatif di HPP sebesar Rp24.800.000
    d. Positif di HPP sebesar Rp24.800.000

Berikut ini adalah informasi untuk soal nomor 43 samoai denaan 45

PT ABC pada tanggal 21 Maret 2018 menjual kendaraan untuk kendaraan operasional dengan harga Rp200.000.000.Kendaraan tersebut dibeli pada 2 April 2015 dengan harga perolehan

Rp400.000.000.Masa manfaat secara komersial adalah 10 tahun, sedangkan menurut fiskal sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan. Metode penyusutan secara komersial menggunakan garis lurus sedangkan secara fiskal menggunakan saldo menurun.

43. Berapakah laba/rugi komersial atas penjualan kendaraan tersebut?
    a. Rugi Rp80.000.000
    b. Laba Rp80.000.000
    c. Rugi Rp60.000.000
    d. Jawaban a, b dan c tidak benar

44. Berapakah PPN yang terutang atas penjualan kendaraan tersebut?
    a. Tidak terutang PPN
    b. Rp40.000.000
    c. Rp20.000.000
    d. Rp0

45. Berapakah laba/rugi fiskal atas penjualan kendaraan tersebut?
    a. Laba Rp25.804.687
    b. Rugi Rp25.804.687
    c. Laba Rp24.804.687
    d. Jawaban a, b dan c tidak benar

46. Perlakuan akuntansi terkait dengan penyusutan atas sewa guna usaha tanpa hak opsi berikut ini yang benar adalah:
    a. Lessor boleh melakukan penyusutan atas aktiva tetap yang di-sewa guna usaha-kan.
    b. Lessor tidak boleh melakukan penyusutan atas aktiva tetap yang di-sewa guna usaha-kan.
    c. Lessee boleh melakukan penyusutan atas aktiva tetap yang di-sewa guna usaha-kan.
    d. Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas aktiva tetap yang di-sewa guna usaha-kan kecuali memenuhi persyaratan tertentu.

47. Perlakuan akuntansi terkait dengan pembayaran atas sewa guna usaha tanpa hak opsi berikut ini yang benar adalah:
    a. Lessor mengakui pendapatan hanya sebagian dari pembayaran sewa guna usaha berupa pendapatan bunga.
    b. Lessor mengakui pendapatan atas seluruh pembayaran sewa guna usaha.
    c. Lessee mengakui beban hanya sebagian dari pembayaran sewa guna usaha berupa bunga.
    d. Lessor mengakui beban atas seluruh pembayaran sewa guna usaha setelah memenuhi persyaratan tertentu.

48. Perlakuan Pajak Penghasilan terkait dengan penyusutan atas sewa guna usaha dengan hak opsi berikut ini yang benar adalah:
    a. Lessor boleh melakukan penyusutan atas aktiva tetap yang di-sewa guna usaha-kan.
    b. Lessor tidak boleh melakukan penyusutan atas aktiva tetap yang di-sewa guna usaha-kan.
    c. Lessee boleh melakukan penyusutan atas aktiva tetap yang di-sewa guna usaha-kan.

d. Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas aktiva tetap yang di-sewa guna usaha-kan kecuali memenuhi persyaratan tertentu.

49. Perlakuan Pajak Penghasilan terkait dengan pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi berikut ini yang benar adalah:
    a. Lessor mengakui penghasilan yang merupakan Objek Pajak atas seluruh pembayaran sewa guna usaha yang diterimanya.
    b. Lessor mengakui penghasilan yang merupakan Objek Pajak hanya sebagian dari pembayaran sewa guna usaha yang diterimanya berupa bunga setelah memenuhi persyaratan tertentu.
    c. Lessee boleh mengakui biaya yang boleh dikurangkan atas seluruh pembayaran sewa guna usaha.
    d. Lessee boleh mengakui biaya yang boleh dikurangkan hanya sebagian dari pembayaran sewa guna usaha berupa bunga setelah memenuhi persyaratan tertentu.

50. PT A mempunyai penyertaan modal pad a PT B sebesar 30% dari modal disetor. Pad a tanggal 1 November 2016 PT A menjual mesin lama kepada PT B. Berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan, pernyataan berikut ini yang benar adalah:
    a. Harga penjualan bagi PT A adalah jumlah yang sesungguhnya diterima.
    b. Harga penjualan bagi PT A adalah jumlah yang seharusnya diterima.
    c. Harga penjualan bagi PT A adalah nilai buku fiskal.
    d. Harga penjualan bagi PT A adalah bisa jumlah yang sesungguhnya diterima , jumlah yang seharusnya diterima, atau nilai buku fiskal tergantung kondisi transaksi.

51. Apabila PT X melakukan penukaran aktiva tetap D dengan aktiva tetap E milik PT Y dan PT X memberikan tambahan uang kepada PT Y, maka pernyataan berikut ini yang benar adalah:
    a. Berdasarkan ketentuan akuntansi (PSAK 16 Revisi 2011), harga perolehan Aktiva Tetap E bagi PT X adalah harga pasar Aktiva Tetap D.
    b. Berdasarkan ketentuan akuntansi (PSAK 16 Revisi 2011), harga perolehan Aktiva Tetap E bagi PT X adalah harga pasar Aktiva Tetap E.
    c. Berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan, harga perolehan Aktiva Tetap E bagi PT X adalah harga pasar Aktiva Tetap D.
    d. Berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan, harga perolehan Aktiva Tetap E bagi PT X adalah harga pasar Aktiva Tetap E.

52. Bentuk restrukturisasi usaha berikut ini yang tidak diperkenankan menggunakan nilai buku dalam menentukan nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan adalah:
    a. Penggabungan usaha.
    b. Peleburan usaha.
    c. Pemekaran usaha dalam rangka "*go public*".
    d. Pemecahan usaha dalam rangka "*go public*".

53. PT Indoselaras memberikan sumbangan kepada Yayasan Yatim Piatu berupa perabot yang telah dipakai selama setahun. Antara PT Indoselaras dengan Yayasan Yatim Piatu tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, maupun penguasaan. Pernyataan terkait perlakukan Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut yang benar adalah:

a. Yayasan Yatim Piatu membukukan perabot dengan menggunakan harga pasar.
b. Yayasan Yatim Piatu membukukan perabot dengan menggunakan nilai buku dari PT Indoselaras.
c. PT Indoselaras harus menghitung keuntungan pengalihan harta berupa sumbangan.
d. Perabot yang diterima oleh Yayasan Yatim Piatu merupakan penghasilan yang merupakanObjek Pajak karena merupakan tambahan kemampuan ekonomis.

54. PT. Ojogumun melakukan Penanaman Modal yang telah memperoleh fasilitas PPh Pasal 31A pada tahun 2014 sebesar Rp55.000.000.000, berupa pembelian aktiva tetap berupa tanah (25 M), bangunan (15 M) dan mesin (15 M). Diketahui penghasilan neto tahun 2015 sebesar Rp5.000.000.000, berapajumlah penghasilan neto setelah pengurangan fasilitas PPh Pasal 31A?
    a. Rp 1.500.000.000
    b. Rp2.250.000.000
    c. Rp 2.750.000.000
    d. Rp 3.500.000.000

55. Perusahaan luar negeri Baharain Ltd mendapatkan deviden dari PT Talp sebesar 10.000.000. PT Talp telah mendapat fasilitas PPh Pasal 31A. Terdapat perjanjian P38 dengan tarif dividen sebesar 15%, namun PT Talp tidak memenuhi syarat administrasi untuk mendapat tarif P3B. Berapakah PPh yang harus dipotong PT. Talp?
    a. Rp1.000.000
    b. Rp1.500.000
    c. Rp2.000.000
    d. Tidak ada pemotongan

56. Dalam hal pembukuan dengan bahasa Inggris dan mata uang USD, wajib pajak di bawah ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak, kecuali....
    a. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama
    b. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya
    c. Wajib Pajak Kerja Sama Operasi (KSO)
    d. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri

57. Daftar aktiva 31 Desember 2015 pada neraca PT Lagiwisuda, akumulasi penyusutan aktiva mesin (masa manfaat sarna dengan ketentuan fiskal kelompok II, garis lurus) sebesar Rp1.453.125.000 dan kurs transaksi 81 pada 31 Desember 2015 Rp 13.500/USD, kurs KMK pada 31 Desember 2015 Rp13.600. Pembelian mesin dilakukan pada tanggal 3 Juni 2013 dengan kurs transaksi sebesar Rp 12.500/USD. Maka untuk keperluan pembukuan menggunakan mata uang asing, harga beli mesin yang dicantumkan dalam neraca PT Lagiwisuda yaitu sebesar .....(USD)

    a. 372,000
    b. 360,000
    c. 330,882
    d. 310,000

58. Saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal ……. pada badan usaha di luar negeri selain di bursa efek adalah pada bulan ke .... setelah tahun pajak berakhir apabila badan usaha di luar negeri tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau pada bulan ke ..... setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut.
    a. lebih dari 50%; 4; 7
    b. lebih dari 50%; 7; 4
    c. paling rendah 50%; 7; 4
    d. paling rendah 50%; 4; 7

59. Wajib Pajak yang menggunakan pembukuan menggunakan bahasa inggris dan mata uang dollar wajib menyampaikan SPT beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia, kecuali untuk lampiran...
    a. Laporan keuangan
    b. Daftar penyusutan dan amortisasi fiskal
    c. Perhitungan kompensasi kerugian fiskal
    d. Kredit pajak luar negeri

60. Apabila sebuah perusahaan firma JOVO membayar bunga yang melebihi kewajaran karena perusahaan meminjam uang kepada anggota sekutunya, maka selisih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar ...
    a. Dapat dibebankan sebagai biaya.
    b. Dikenakan PPh Final 15%
    c. Tidak dapat dibebankan sebagai biaya
    d. Dianggap sebagai dividen dan dipotong PPh Pasal 23

61. PT Mawar menukarkan mesin produksinya dengan Truk baru. Harga perolehan mesin produksi adalah Rp 400.000.000 akumulasi depresiasi sampai tanggal pertukaran sebesar Rp 275.000.000, sehingga nilai bukunya adalah Rp 125.000.000 . Nilai Wajar mesin adalah 180.000.000 dan PT Mawar harus membayar uang sebesar Rp 20.000.000. PPN Keluaran yang dipungut oleh PT Mawar Merah adalah ...
    a. Rp 12.500.000
    b. Rp 18.000.000
    c. Rp 20.000.000
    d. Jawaban a, b, c salah

62. Pajak Penghasilan atas pengalihan aktiva setoran modal dikenakan atas:
    a. Nilai buku aktiva
    b. Nilai baru yang ditentukan perusahaan
    c. Nilai awal perolehan aktiva
    d. Nilai pasar aktiva
63. Perusahaan properti membangun sendiri sebuah aktiva bangunan yang digunakan sebagai kantor pemasaran, maka ...
    a. Dikenai PPN Pasal16C UU PPN
    b. Dikenai PPN Pasal4 ayat (1) UU PPN

c. Dikenai PPh
d. Tidak dikenai PPN dan PPh

64. Berikut ini beberapa persyaratan restrukturisasi:
    i. Harus ada persetujuan dari pemegang saham.
    ii. Kewajiban perpajakan masing-masing perusahaan harus terlebih dahulu diselesaikan sebelum terbentuknya badan baru;
    iii. Perusahaan hasil restrukturisasi tersebut harus memiliki NPWP yang baru. Sedangkan NPWP perusahaan lama dilaporkan ke KPP setempat untuk dihapuskan;

    Hal tersebut merupakan syarat untuk melakukan restrukturisasi jenis ....
    a. Likuidasi
    b. Pemekaran
    c. Merger
    d. Konsolidasi

65. Berikut ini yang bukan merupakan ciri khas dari purchase method dalam restrukturisasi ...
    a. Selisih harga pembelian dengan nilai buku modal tidak akan membentuk goodwill
    b. Aset perusahaan yang diakuisisi dicatat dengan harga pasar oleh perusahaan yang mengakuisisi
    c. Perusahaan yang mengakuisisi dapat menetukan biaya perolehan baru atas asset-aset yang diakuisisi
    d. Selisih antara harga pasar dengan nilai buku dicatat sebagai objek pajak penghasilan.

66. Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Lessor dalam sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebagai berikut, kecuali ...
    a. Imbalan jasa sewa guna usaha merupakan penghasilan bagi lessor
    b. Lessor boleh menyusutkan asset yang di-sewa guna usahakan
    c. Lessor dapat melakukan pencadangan penghapusan piutang ragu-ragu
    d. Dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tidak dibebani untuk menutup kerugian piutang tak tertagih maka sisanya dihitung sebagai penghasilan bagi lessor

67. Secara fiskal, Lessor hanya diperkenankan memberikan pembiayaan barang modal kepada lessee dengan syarat sebagai berikut, kecuali ...
    a. Lessee mempunyai NPWP
    b. Lessee mempunyai kegiatan usaha
    c. Lessee mempunyai pekerjaan bebas
    d. Lessee merupakan Wajib Pajak Badan

68. Pada tanggal 1 Januari 2017, PT Budi Pekerti membayar angsuran sewa guna usaha dengan hak opsi sebesar Rp60.000.000 kepada PT Stancorp Finance. Pembayaran tersebut terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp40.981.000 dan biaya bunga Rp19.019.000. Berdasarkan ketentuan perpajakan, manakah pernyataan berikut yang benar:
    a. Atas biaya bunga dan angsuran sebesar Rp60.000.000 tersebut tidak boleh menjadi biaya fiskal bagi PT Budi Pekerti.
    b. Penghasilan yang menjadi objek pajak bagi PT Stancorp Finance adalah sebesarRp60.000.000.

c. PT Budi pekerti diperkenankan melakukan koreksi fiskal negatif terhadap beban bunga sebesar angsuran pokok yang dibayarkan.
d. PT Budi Pekerti harus memotong PPh Pasal 23 atas beban bunga yang dibayarkan kepada PT Stacorp Finance.

69. Berdasarkan PSAK 30 mengenai akuntansi sewa, ketentuan mengenai penyusutan atas aset sewaan diatur sebagai berikut, kecuali:
    a. Untuk jenis sewa pembiayaan, beban penyusutan aset sewaan hanya boleh dilakukan oleh pihak lessee.
    b. Hanya lessor yang berhak membebankan penyusutan aset sewaan yang dilakukan dengan jenis sewa operasi
    c. Kebijakan atas masa manfaat penyusutan aset sewaan untuk sewa operasi harus konsisten dengan kebijakan penyusutan normal untuk aset sejenis.
    d. Baik lessor maupun lessee tidak diperkenankan membiayakan beban penyusutan atas aset sewaan.

70. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar terkait perlakuan beban penyusutan aset sewa guna usaha dengan hak opsi berdasarkan ketentuan perpajakan:
    a. Hanya lessee yang boleh membebankan biaya penyusutan fiskal
    b. Hanya lessor yang boleh membebankan biaya penyusutan fiskal
    c. Lessee maupun lessor diperbolehkan membebankan biaya penyusutan fiskal
    d. Terutang Pajak Pertambahan Nilai

BAB IX STUDI KASUS AKUNTANSI PAJAK

1. STUDI KASUS I

PT. ABC yang bergerak di bidang perdagangan bahan bangunan dan pengerjaan jasa konstruksi melakukan transaksi selama bulan Februari 2019 sebagai berikut:

1. Tanggal 1 Februari 2019, PT. ABC (PKP, Pembukuan Rupiah) menyewa gedung pabrik (dalam hutang dagang) sekaligus beserta mesinnya untuk lima tahun kepada PT. DEF (PKP) dengan nilai US$100.000 (untuk gudang) dan US$50.000 (untuk kendaraan). Kurs KMK Tanggal 1 Mei 2017 Rp13.000, kurs beli BI Rp13.000, kurs jual BI Rp14.000 (Pendekatan aktiva). Selain itu PT. ABC menyewa secara *Capital lease* Mesin Pabrik selama lima tahun dan memenuhi persyaratan *Capital Lease* baik secara komersial maupun fiskal, tingkat bunga *Flat*, *Leasing* perbulan Rp120.000.000, pokok Rp100.000.000, bunga *flat* Rp20.000.000, Termasuk jurnal penyesuaian akhir tahun.
2. Tanggal 25 Februari 2019 melakukan pembayaran gaji sebagai berikut:

Keterangan	Gaji	Tunjangan Transport	luran Pensiun	PPh Ps. 21 dipotong	*Take home pay*
Pegawai Tetap	60.000.000	20.000.000	2.750.000	3.200.000	76.550.000
Pegawai TidakTetap	8.700.000	1.600.000	-	260.000	10.040.000

   luran pensiun merupakan program iuran pasti yang dibayarkan ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Dari iuran pensiun sebesar Rp2.750.000, sebesar Rp2.500.000 ditanggung oleh perusahaan, sedangkan sebesar Rp 750.000 ditanggung oleh karyawan.
3. Tanggal 5 Februari 2017 membeli kredit baja barang dagangan (*Perpetual*) US$50.000 dari PT. Krakatau Steel. Kurs KMK Rp14.000, Kurs Beli BI Rp13.500, Kurs Jual BI Rp14.500.
4. Tanggal 6 Februari 2017 memperoleh Hak Pemakaian (*Patent*) Campuran Beton MIX untuk lima tahun US$100.000 yang dicatat dengan pendekatan aktiva. Kurs Jual BI Rp14.000, kurs Beli Rp13.500, Kurs KMK Rp14.000.
5. Tanggal 7 Februari 2017 impor Baja Barang Dagangan, Tanggal tersebut sampai di Pelabutang Tanjung Priuk dan dibayar pajak dan bea (Pembelian Kredit/Perpetual) *Cost* US$ 500.000, *Insurance & Freight* US$50.000, *Free on Board Destination* dari PT. Krakatau Steel. Kurs KMK Rp14.000, Kurs Beli BI Rp13.500, Kurs Jual BI Rp14.500.

6. Tanggal 8 Februari Menyerahkan Besi Beton Ke Bendahara PKN STAN Rp500.000.000, Tanggal 20 Februari Ditagih atas penyerahan tersebut dan tanggal 25 Februari Dibayar.
7. Tanggal 26 Februari 2017 Membeli tanah Hak Guna Bangunan seharga Rp 400.000.000 dan bangunan permanen seharga Rp800.000.000 dari Bapak Salim. NJOP tanah dan bangunan tersebut sesuai SPPT PBB adalah sebesar Rp1.800.000.000 dan dibuatkan akta jual belinya. Sesuai kesepakatan pajak-pajak ditanggung oleh masing masing sesuai ketentuan. Diketahui bahwa NPOPTKP sebesar Rp30.000.000 dan Biaya Notaris Rp15.000.000.
8. Tanggasl 27 Februari Meyerahkan jasa Konstrusi fisik Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) 2 % sejumlah Rp5.500.000.000, jumlah tersebut sudah termasuk PPN namun belum dipotong PPh Final (Kredit).
9. Tanggal 28 Februari membuat jurnal Pajak Masukan dan Pajak keluaran sebagai perhitungan kewajiban PPN.
10. Tanggal 5 Maret 2017 Membayar pajak pajak Negara untuk SPT Masa yang menjadi kewajiban PT ABC

Pertanyaan:

1. Buatlah jurnal akhir tahun untuk kewajiban pajak kini dan pajak tangguhan, bagi PT ABC bila diketahui sebagai berikut

		Jasa Konstruksi	Perdagangan
Penghasilan Neto komersial		8.000.000.000	12.000.000.000
Koreksi Positif Beda waktu			2.000.000.000
Koreksi Positif Beda Tetap			1. 500.000.000
Kredit Pajak			
PPh Pasal22	250.000.000		
PPh Pasal23	200.000.000		
PPh Pasal25	240.000.000		
PPh PasaI4(2)	700.000.000		

2. Hitung Pajak Terhutang dan buatlah jurnalnya!

PT. ABC
PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG
PER ………………………..

2. STUDI KASUS II

PT ABC, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dengan metode persediaan periodik, telah menjadi PKP sejak tahun 2002. Pada bulan November 2018 melakukan transaksi sebagai berikut:

(semua transaksi belum termasuk PPN, PPh dan para pihak sudah ber-NPWP kecuali ditentukan lain):

Tanggal	Transaksi
1	Melakukan pembelian mie instan secara tunai dari PT DEF (PKP) senilai Rp10.000.000
3	Melakukan pembelian beras secara kredit dari PT Transmart (PKP) senilai Rp5.000.000
7	Melakukan penjualan teh celup, kopi bubuk, susu bubuk, dan minuman bersoda kepada bendahara Kementerian Sosial secara tunai senilai Rp35.000.000
10	Melakukan pembayaran sewa mobil untuk angkut barang kepada Pak Hendri (tidak memiliki NPWP) senilai Rp1.000.000
16	Membayar gaji dan tunjangan kepada 10 orang pegawai tetap senilai Rp82.000.000 dengan penghitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan sebesar Rp3.000.000 dan PPh Pasal 21 yang dipotong sebesar Rp4.750.250.
19	Melakukan pembayaran sewa pendingin gudang kepada PT Dingin (PKP) senilai Rp10.000.000
22	Melakukan penjualan mie instan kepada PT KLM (Non-PKP) senilai Rp40.000.000, barang belum diserahkan, uang muka sudah diterima 25% nya.
25	Melakukan penyerahan mie instan kepada PT KLM
28	Diterima sisa pembayaran atas penjualan mie instan kepada PT KLM
30	Membayar sewa gudang kepada Pak Joe (tidak memiliki NPWP) sebesar Rp100.000.000

Perintah: Buatlah jurnal yang harus dibuat PT ABC pada bulan November 2018!

3. STUDI KASUS III

PT. ABC adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan bangunan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Jakarta. Berikut informasi umum tentang PT ABC

1. Nama WP : PT. ABC
2. NPWP : 01.542.224.7-012.000
3. Alamat : JI. Sarmili No.666, Tangerang
4. Jenis Usaha : Konstruksi dan perdagangan
5. Pembukuan : Akrual; Bahasa Indonesia, Komputer, Rupiah
6. Metode penyusutan : Garis lurus
7. Tahun Buku : 1 Januari s.d 31 Desember 2018
8. Pengurus

No	Nama dan Alamat	NPWP	Jabatan
1	Abdul Najib JI. Kemanggisan 12, Jakarta Barat	06.323.620.2-015.000	Komisaris
2	Jaonaita JI. Kebon Jeruk 51, Jakarta Barat	06.321.610.3-013.000	Direktur Utama

9. Pemegang Saham

No	Nama dan Alamat	NPWP	Rupiah	Lembar	%
1	Joni Indo JI Kemanggisan 12, Jakarta Barat	06.323.620.2-015.000	2.500.000.000	2.500	50
2	Salahudin JI Cipto, Ciledug	06.111.051.4-012.000	1.500.000.000	1.500	30
3	Adi Nugraha JI Anggrek 2, Slipi Jakarta Barat	06.319.601.3-011.000	1.000.000.000	1.000	20

Laporan Laba Rugi dan Laba Rugi Komprehensif Lainnya PT ABC Tahun 2018

Nama Akun	Jumlah	Pos Dalam SPT
Penjualan bruto	45.000.000.000	
Potongan penjualan	(3.000.000.000)	
Retur penjualan	(1.000.000.000)	
Penjualan neto	41.000.000.000	
Harga pokok penjualan		
Persediaan awal bahan baku	2.500.000.000	Persediaan awal
Pembelian Bahan Baku	10.500.000.000	
Bahan Baku siap dipakai	13.000.000.000	
Persediaan akhir bahan baku	3.000.000.000	Persediaan akhir

Nama Akun	Jumlah	Pos Dalam SPT
Pemakaian bahan baku	10.000.000.000	
Persediaan awal bahan pembantu	500.000.000	Persediaan awal
Pembelian Bahan Pembantu	4.500.000.000	
Bahan Pembantu siap dipakai	5.000.000.000	
Persediaan akhir bahan Pembantu	1.500.000.000	Persediaan akhir
Pemakaian bahan pembantu	3.500.000.000	
Gaji dan upah	5.000.000.000	Gaji dan Upah
Tunjangan PPh Pasal 21 Manager dan Staff Pabrik	250.000.000	Gaji dan Upah
Beban PPh 21 Buruh Pabrik Ditanggung Perusahaan	100.000.000	Gaji dan Upah
Biaya makan minum bersama sama seluruh karyawan pabrik	300.000.000	Gaji dan Upah
Beban seragam karyawan pabrik	100.000.000	Gaji dan Upah
Transportasi	500.000.000	Transportasi
Penyusutan	1.500.000.000	Tranportasi
Beban listrik Pabrik	500.000.000	Lain-lain
Pemakaian air	250.000.000	Lain-lain
Biaya lain-lain	125.000.000	Lain-lain
Biaya produksi	22.125.000.000	
Barang dalam proses awal	1.000.000.000	Persediaan awal
Barang dalam proses akhir	800.000.000	Persediaan akhir
Harga pokok produksi	22.325.000.000	
Barang jadi awal	2.000.000.000	Persediaan awal
Barang jadi akhir	2.200.000.000	Persediaan akhir
Harga pokok penjualan	22.125.000.000	
Laba kotor	18.875.000.000	
Biaya Umum, Administrasi, dan Penjualan Gaji, THR, bonus	3.500.000.000	Gaji
Tunjangan PPh Pasal 21 Direksi dan Staff	200.000.000	Gaji
Biaya Pengobatan Direksi (Reimbursh)	100.000.000	Gaji
Biaya Pen_g_obatanStaff (Dibyar ke Rumah sa kit)	500.000.000	Gaji
luran Pensiun kepada Yavasan Dana Pensiun (Izin MenKeu)	850.000.000	Gaji
Parcell Lebaran	100.000.000	Gaji
Perjalanan dinas	125.000.000	Transportasi
Pengangkutan	900.000.000	Transportasi
Penyusutan	1.200.000.000	Penyusutan
Sewa mesin Photocopy	55.000.000	Sewa
Jasa Reparasi	330.000.000	Jasa

Nama Akun	Jumlah	Pos Dalam SPT
Beban Piutang ragu-ragu	150.000.000	Biaya Piutang tak tertagih
Royalti	330.000.000	Royalti
Pemasaran	500.000.000	Pemasanan
Alat tulis kantor	435.000.000	Biaya Lainnya
Listrik	550.000.000	Biaya Lainnya
Telepon/teleks	350.000.000	Biaya Lainnya
Biaya lain lain		
Jamuan tamu administrasi umum	40.000.000	Biaya Lainnya
Sumbangan HUT Kemerdekaan RI	60.000.000	Biaya Lainnya
Jamuan tamu pemasaran	60.000.000	Biaya Lainnya
Sumbangan PSSI	20.000.000	Biaya Lainnya
Denda Pajak	20.000.000	Biaya Lainnya
Biaya kursus	5.500.000	Biaya Lainnya
PBB kantor	3.500.000	Biaya Lainnya
Sumbangan	5.000.000	Biaya Lainnya
Faktur pajak lengkap pembelian alat tulis kantor	500.000	Biaya Lainnya
Faktur pajak tidak lengkap spare part kendaraan sedan dinas direksi	500.000	Biaya Lainnya
Faktur pajak tidak lengkap spare part kendaraan antar jemput karyawan (tidak dapat dikreditkan)	6.000.000	Biaya Lainnya
Biaya lain lain nya	19.000.000	Biaya Lainnya
Jumlah biaya usaha	10.415.000.000	
Laba usaha	8.460.000.000	
Pendapatan (Beban) Luar Usaha:		
Dividen dari PT Alamjaya (penyertaan 10%)	170.000.000	Pendapatan lain dalam negeri
Pendapatan Investasi PT Mega Baja (penyertaan 24%)	240.000.000	Pendapatan lain dalam negeri
Pendapatan Investasi PT Aumindo (penyertaan 40%)	400.000.000	Pendapatan lain dalam negeri
Laba Penjualan investasi saham di bursa efek Indonesia	100.000.000	Pendapatan lain dalam negeri
Sewa Kendaraan dari PT. Abadi Leasing	98.000.000	Pendapatan lain dalam negeri
Keuntungan penjualan gudang	40.000.000	Pendapatan lain dalam negeri
Pendapatan bunga deposito	100.000.000	Pendapatan lain dalam negeri

Nama Akun	Jumlah	Pos Dalam SPT
Bunga pinjaman Bank BNI	(50.000.000)	Biaya Bunga
Rugi selisih kurs	(60.000.000)	Biaya lain dalam negeri
Deviden dari ABC Corp	80.000.000	Pendapatan lain luar negeri
Rugi cabang di Korea	(100.000.000)	Pendapatan lain luar negeri
Dividen dari Steil Inc.	140.000.000	Pendapatan lain luar negeri
Biaya dan Pendapatan lain-lain	1.158.000.000	
Penghasilan bersih	9.618.000.000	
Laba komprehensive lainnya (Selisih Fair Value Tanah)	500.000.000	
	10.118.000.000	
Deviden yang dibagikan	1.000.000.000	
Penghasilan setelah deviden	9.118.000.000	

Keterangan:

Jurnal Potongan penjualan

Potongan Penjualan	3.000.000.000	
Cadangan Potongan Penjualan		3.000.000.000
Cadangan Potongan Penjualan	2.000.000.000	
Piutang Dagang		2.000.000.000

Jurnal Retur penjualan

Retur Penjualan	1.000.000.000	
Cadangan Retur Penjualan		1.000.000.000
Cadangan Retur Penjualan	1.500.000.000	
Piutang Dagang Retur yang memenuhi syarat perpajakan Rp1.000.000.000		1.500.000.000

Jurnal Piutang Ragu-ragu

Beban piutang ragu ragi	150.000.000	
Cadangan Piutang tak tertagih		150.000.000
Cadangan Piutang tak tertagih	100.000.000	
Piutang Dagang Piutang tak tertagih		100.000.000

- Biaya transportasi termasuk diantaranya bahan bakar kendaraan sedan milik Mananger Produksi Rp75.000.000
- Dalam biaya lain produksi terdapat sumbangan Rp25.000.000 bencana nasional, dan sumbangan keamanan Rp10.000.000.
- PT. ABC menerapkan konservatime dalam penilaian persediaan data sebagai berikut:

Keterangan Persediaan	Cost	NRV
Persediaan awal bahan pembantu	400.000.000	600.000.000
Persediaan akhir bahan pembantu	1.600.000.000	1.500.000.000
Persediaan awal bahan baku	2.600.000.000	2.500.000.000
Persediaan akhir bahan baku	3.500.000.000	3.000.000.000

- Biaya sewa mesin Photocopy termasuk pajak masukan Rp10.000.000 yang dikreditkan Biaya Jasa Reparasi termasuk PPN Masukan Rp30.000.000 yang dikreditkan di PPN Piutang yang nyata-nyata tidak tertagih Rp100.000.000 dan tidak ada yang memenuhi syarat fiskal.
- Biaya Royalti Termasuk PPN Masukan Rp30.000.000 yang tidak dikreditkan di PPN
- Jamuan tamu yang tidak ada daftar nominatif, diantaranya Rp10.000.000 terkait usaha
- Sumbangan HUT Kemerdekaan RI, tidak ada bukti
- Jamuan tamu yang ada daftar nominatif, yang terkait usaha Rp400.000.000.
- Sumbangan Komite Olah Raga Nasional, tidak ada bukti
- Denda dan bunga Surat Tagihan Pajak Rp10.000.000, denda PKB Rp5.000.000,
- Biaya Kursus digunakan untuk Kursus Jahit istri Direksi.
- PBB kantor Pokok Rp3.250.000, sanksi Rp250.000.
- Sumbangan kepada karyawan dalam bentuk natura Rp3.500.000 dan uang Rp1.500.000
- Faktur pajak lengkap pembelian alat tulis kantor dan dikreditkan
- Faktur pajak tidak lengkap *spare part* kendaraan sedan dinas direksi
- Faktur pajak tidak lengkap *spare part* kendaraan antar jemput karyawan (tidak dapat dikreditkan)
- Biaya lain lainya Tidak dapat dirinci karena tidak ada bukti
- Deviden dari PT Alamjaya Setelah Dipotong PPh 23
- Laba bersih PT Mega Baja Tahun 2017 Rp1.000.000.000 dan membagikan deviden Rp500.000.000.
- Laba bersih PT Alumindo Rp1.000.000.000 dan deviden dibagikan Rp400.000.000.
- PPh Pasal 4 ayat (2) atas penjualan saham di bursa efek Rp1.000.000,

- Penghasilan Sewa Kendaraan Telah Dipotong PPh 23
- Keuntungan Penjualan Gudang Setelah Dipotong Rp10.000.000 atas PPh Pasal 4 ayat (2)
- Rata-rata deposito Rp1.000.000.000, rata-rata pinjaman Rp750.000.000.
- Deviden dari ABC CoRpMalaysia telah dipotong pajak Rp20.000.000, Rugi cabang di Jepang kepemilikan 30%
- Devided dari Stell Inc. telah dikurangi pajak yang dipotong Rp60.000.000

Data aktiva tetap

No	Jenis Aktiva Tetap	Perolehan	Harga Perolehan	Kelompok
1	Mesin pabrik	02/09/2009	9.000.000.000	Kelompok 3
2	Mesin diesel	04-10-2010	5.000.000.000	Kelompok 2
3	Generator listrik	01-09-2009	1.800.000.000	Kelompok 1
4	Bangunan pabrik	10-05-2002	12.500.000.000	Permanen
5	Kendaraan antar jemput karyawan	05-03-2006	1.225.000.000	Kelompok 2
6	Kendaraan sedan dinas direksi	07/04/2012	1.500.000.000	Kelompok 2
7	Komputer/printer	02-07-2013	1.800.000.000	Kelompok 1
8	Perabotan kantor	15-07-2015	1.300.000.000	Kelompok 1
9	Peralatan kantor	02-03-2016	1.850.000.000	Kelompok 2
10	Bangunan kantor	02-04-2006	3.000.000.000	Permanen
11	Gudang A	15-02-2016	1.500.000.000	Permanen
12	Gudang B	02-04-2010	1.200.000.000	Permanen

- Metode penyusutan untuk tujuan komersial dan tujuan fiskal menggunakan metode garis lurus.
- Beban penyusutan mesin pabrik, mesin diesel, generator listrik, dan bangunan pabrik dilaporkan pada biaya produksi. Sedangkan beban penyusutan aset tetap yang lain dilaporkan sebagai Beban Umum, Administrasi, dan Penjualan.

Kredit Pajak

1. PPh pasal 22 impor yang dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama tahun 2018 sebesar Rp 80.000.000.
2. PPh pasal 25 yang telah dibayar tahun 2018 untuk bulan Januari, Februari dan Maret masing-masing Rp100.000.000, sedangkan untuk bulan April s.d. Oktoberr masing-masing sebesar Rp120.000.000. Di samping itu telah diterbitkan STP PPh pasal 25 oleh KPP setempat pada tanggal 7 Januari 2019 untuk bulan Nopember Rp144.000.000 (termasuk denda dan bunga Rp24.000.000) sudah dibayar dan Desember Rp168.000.000 termasuk denda Rp24.000.000 belum dibayar..

Diminta:

1. Hitunglah Penghasilan Kena Pajak tahun pajak 2018 dengan membuat rekonsiliasi fiskal
2. Hitunglah PPh Terutang tahun pajak 2018
3. Hitunglah PPh yang kurang bayar atau lebih bayar
4. Hitunglah Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak 2018
5. Buat Jurnal Untuk mencatat kewajiban Pajak kini dan pajak tangguhan

PT. ABC
PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG
PER ………………………..

PT. ABC
PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG
PER ………………………..

4. STUDI KASUS IV

Laporan Laba Rugi Komersial
PT Sekali Merdeka Tetap Merdeka
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018

No.	Uraian	Komersial
A	Penghasilan dari usaha	52.000.000.000
B	Harga Pokok Penjualan	35.000.000.000
C	Laba Bruto Usaha	17.000.000.000
D	Beban Usaha	
	1. Gaji dan bonus pegawai tetap	2.500.000.000
	2. Tunjangan transportasi dan tunjangan lainnya	800.000.000
	3. PPh 21 ditanggung perusahaan	165.000.000
	4. Seragam pegawai	145.250.000
	5. Telepon. air. dan listrik	937.500.000
	6. Biaya sewa kantor	1.253.450.000
	7. Penyusutan aktiva tetap	985.000.000
	8. Beban Royalti	1.200.000.000
	9. Biaya promosi dan jamuan	350.000.000
	10. Penghapusan piutang	95.000.000
	11. Pemeliharaan kendaraan	335.250.000
	12. Beasiswa. magang. dan pelatihan	250.000.000
	13. Pembagian sembako	125.000.000
	Jumlah Beban Usaha	9.141.450.000
E	Laba Bruto Operasi	7.878.550.000
F	Pendapatan non operasi	
	1. Pendapatan Dividen	1.500.000.000
	2. Pendapatan sewa Gudang	1.000.000.000
	Jumlah Pendapatan non operasi	2.500.000.000
G	Biaya non operasi	
	1. Bunga pinjaman	100.000.000
	2. Denda pajak	150.000.000
	Jumlah Biaya non operasi	250.000.000
H	Laba Neto Operasi	10.108.550.000

Tambahan Keterangan:

1. Di dalam nilai penghasilan dari usaha sudah termasuk pencadangan retur penjualan sebesar Rp25.000.000
2. Informasi terkait tunjangan transportasi dan tunjangan lainnya:

a. Tunjangan transportasi hanya diberikan kepada pegawai sekelas direktur dan manajer. jumlah tunjangan transportasi yang dibayarkan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp200.000.000
b. Di dalam tunjangan lainnya, termasuk tunjangan yang diberikan dalam bentuk beras dan bahan kebutuhan pokok kepada karyawan pabrik dengan nilai total Rp50.000.000.

3. Biaya seragam pegawai terdiri dari seragam batik untuk karyawan kantor sebesar Rp45.250.000 dan seragam buruh pabrik yang merupakan keharusan untuk menunjang keselamatan kerja sebesar Rp100.000.000.
4. Biaya telepon, listrik, dan air termasuk biaya pembelian pulsa buat direktur dan manajer sebesar Rp200.000.000.
5. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan informasi sebagai berikut:

	Nama Aktiva	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Masa Manfaat Komersial	Beban Penyusutan 2017
a	Kendaraan niaga	2015	750.000.000	5	150.000.000
b	Mercedes Benz	2016	1.800.000.000	5	360.000.000
c	Mesin dan peralatan pabrik	2000	2.000.000.000	8	250.000.000
d	Gedung Pabrik dan kantor	2000	3.500.000.000	20	175.000.000
e	Gudang (disewakan)	2010	1.000.000.000	20	50.000.000
	Jumlah		9.050.000.000		985.000.000

6. Beban royalti merupakan pembayaran kepada Asia Pte. Ltd Singapore atas hak penggunaan merk, di dalamnya termasuk biaya PPh Pasal 26 yang ditanggung perusahaan. Atas transaksi tersebut Asia Pte. Ltd. tidak melengkapi dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat P3B.
7. Biaya promosi dan jamuan telah dibuatkan daftar nominatifnya. Dalam biaya tersebut terdapat pemberian sumbangan dan karangan bunga sebesar Rp37.500.000 sebagai ucapan selamat kepada karyawan yang melangsungkan pernikahan, ulang tahun, maupun ucapan duka cita.
8. Atas penghapusan piutang tak tertagih merupakan piutang tak tertagih terhadap debitur kecil dan telah dilaporkan daftarnya ke Direktorat Jenderal Pajak.
9. Biaya pemeliharaan kendaraan sebesar Rp225.000.000 digunakan untuk perawatan rutin dan servis mobil dinas direktur dan manajer.

10. Bunga pinjaman dibayarkan atas utang kepada pemegang saham yang dilakukan pada tanggal 1 Januari 2018 dengan nilai utang Rp1.000.000.000 dengan bunga 10% per tahun. Tingkat suku bunga wajar untuk pinjaman pada tahun 2018 adalah sebesar 7% per tahun.
11. Penghasilan dividen berasal dari penyertaan saham 10% di PT Langgeng Kencono

Diminta:

1. Buatlah rekonsiliasi fiskal PT Sekali Merdeka Tetap Merdeka!
2. Buatlah jurnal atas PPh yang kurang/lebih dibayar apabila diketahui kredit pajak PPh Pasal 23 Rp225.000.000 dan angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2018 sebesar Rp 1.500.000.000!

5. STUDI KASUS V

Pada tanggal 1 Oktober 2015 PT Andalan Indonesia menjual mesin kepada PT Maju Jaya dengan harga sebesar Rp460.000.000. Harga pasar mesin tersebut adalah Rp600.000.000. PT Andalan Indonesia mempunyai penyertaan modal pada PT Maju Jaya sebesar 30%. Harga perolehan dan nilai buku untuk mesin tersebut adalah:

Uraian	Komersial (Rp)	Fiskal (Rp)
Harga Perolehan	1.000.000.000	1.000.000.000
Akumulasi Penyusutan	600.000.000	500.000.000

a. Hitung keuntungan atau kerugian penjualan baik secara akuntansi maupun secara fiskal bagi PT Andalan Indonesia!

b. Berapa harga perolehan mesin bagi PT Maju Jaya baik secara akuntansi maupun secara komersial?

c. Atas transaksi tersebut, apakah bagi PT Maju Jaya terdapat penghasilan yang merupakan Objek Pajak? Kalau ada, jelaskan alasan dan dasar hukumnya!

PT ANDALAN INDONESIA
PERHITUNGAN ……..

PT MAJU JAYA
PERHITUANGAN …………………

6. **STUDI KASUS VI**

PT Sekawan melakukan penyertaan modal secara langsung pada PT Primajaya sebesar 20% (mempunyai pengaruh signifikan) pada tanggal 5 Januari 2014. Laba setelah pajak tahun 2014 sebesar Rp100.000.000.000. Pada tanggal 5 Mei 2015 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan RUPS memutuskan bahwa akan dibagikan dividen dari laba tahun 2014 yang pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 31 Mei 2015. PT Sekawan melakukan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Buatlah penyesuaian fiskal atas perlakuan akuntansi dan perlakuan fiskal (PPh) yang seharusnya dilakukan oleh PT Sekawan untuk tahun 2014 dan tahun 2015 terkait penyertaan modal PT Primajaya!

PT SEKAWAN
PERHITUANGAN …………………

7. Studi Kasus VII

PT ABC melakukan revaluasi aktiva tetap pada tanggal 31 Desember 2015 Permohonan revaluasi aktiva tetap disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak pada tanggl 31 Oktober 2015. Penilaian kembali aktiva tetap dilakukan oleh perusahaan jasa penilai independen yang diakui pemerintah. Berikut ini data revaluasi aktiva tetap:

Uraian	Sebelum Revaluasi		Setelah Revaluasi
	Akuntansi (Rp)	Fiskal (Rp)	Harga Pasar (Rp)
Tanah	50.000.000.000	50.000.000.000	150.000.000.000
Aktiva Tetap selain tanah	180.000.000.000	180.000.000.000	
Akumulasi Penyusutan -	60.000.000.000	80.000.000.000	
Nilai Buku Aktiva Tetap	120.000.000.000	100.000.000.000	200.000.000.000

PT ABC mempunyai rugi fiskal tahun pajak 2014 sebesar Rp1.000.000.000.

Diminta:

a) Hitung PPh Final atas Revaluasi Aktiva Tetap!

b) Buat jurnal untuk mencatat selisih lebih Revaluasi Aktiva Tetap!

PT ABC
PERHITUANGAN …………………

PT. ABC
JURNAL UMUM
PER …………………………

Tanggal	Nama Akun	Ref.	Debet	Kredit

8. Studi Kasus VIII

Tn. Amas, pengusaha kecil yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 2 Januari 2010, mempunyai usaha dengan nama UD. Al Ihsan yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar tekstil. Pada tanggal 31 Desember 2015 UD Al Ihsan menjual tanah dan bangunan yang berfungsi sebagai gudang. Gudang tersebut dijual kepada Tn. Henry (Pengusaha Kena Pajak) dengan harga Rp330.000.000 tidak termasuk PPN. Nilai Jual Objek Pajak Gudang tersebut Rp320.000.000, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak di daerah tersebut Rp80.000.000 dan tarif pajak daerah atas perolehan hak dan atau bangunan sebesar 5%. Gudang tersebut dulunya dibeli UD Al Ihsan pada tanggal 2 Januari 2012 seharga Rp412.500.000 termasuk PPN, dan disusutkan secara komersial yang sama dengan ketentuan fiskal.

Bagaimana ketentuan akuntansi perpajakan atas transaksi kedua pihak tersebut dan buatlah jurnalnya!

9. Studi Kasus IX

Berikut data beberapa perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap:

a. Revaluasi aktiva tetap dilakukan oleh *appraisal* independen yang diakui oleh pemerintah dan memperoleh ijin melakukan revaluasi sesuai ketentuan pajak.

b. Tabel pengajuan, nilai dan PPh revaluasi aktiva tetap sebagai berikut:

Nama WP	Aktiva	Akumulasi Penyusutan Fiskal 2014	Penyusutan Komersial Sebelum Revaluasi		
			2015	2016	2017
PT. A	Gudang	49.476.065	123.690.163	10.307.514	-
PT. I	Tanah	-	-	-	-
PT. U	Mesin	79.249.796	20.021.001	20.021.001	-
PT. E	Gedung	350.710.833	80.162.476	80.162.476	13.360.413
PT. O	Truk	60.598.578	30.647.557	-	-

c. Tabel akumulasi penyusutan fiskal dan penyusutan komersial sebagai berikut:

Nama WP	**Aktiva**	**Tanggal Pengajuan Revaluasi**	**Nilai Setelah Revaluasi**	**PPh Revaluasi**
PT. A	Gudang	26/01/2016	1.919.190.000	3.872.864
PT. I	Tanah	15/12/2015	2.121.210.000	4.264.167
PT. U	Mesin	28/12/2016	90.909.000	1.200.077
PT. E	Gedung	22/02/2017	2.020.202.000	58.395.764
PT. O	Truk	17/11/2015	150.150.000	429.768

d. Tabel koreksi penyusutan fiskal positif dan negatif sebagai berikut:

Nama WP	Aktiva	Koreksi Fiskal 2015		Koreksi Fiskal 2016		Koreksi Fiskal 2017	
		Positif	Negatif	Positif	Negatif	Positif	Negatif
PT. A	Gudang	24.738.033	-	2.061.503	-	-	-
PT. I	Tanah	-	-	-	-	-	-
PT. U	Mesin	-	5.005.250	-	5.005.250	-	-
PT. E	Gedung	-	20.040.619	-	20.040.619	3.340.103	-
PT. O	Truk	26.468.345	-	-	-	-	-

Diminta:

Hitunglah nilai perolehan dari masing-masing aktiva di atas!

10. Studi Kasus X

Dalam data keuangan PT. Oye di tahun 2015 terdapat hal-hal sebagai berikut:

a. peredaran bruto sebesar Rp58.000.000.000

b. penghasilan neto komersial sebesar Rp31.000.000.000, terdiri dari:
   - penghasilan neto dalam negeri sebesar Rp28.000.000.000;
   - penghasilan luar negeri sebesar Rp3.000.000.000 sebelum dipotong pajak di luar negeri sebesar Rp600.000.000;

c. PT. Oye mendapat fasilitas PPh Pasal 31A mulai tahun 2015 dengan jumlah penanaman Modal sebesar Rp42.000.000.000;

d. terdapat koreksi fiskal (tidak termasuk koreksi penyusutan aktiva tetap) sbb:
   - koreksi fiskal positif sebesar Rp3.500.000.000;
   - koreksi fiskal negatif sebesar Rp1.500.000.000

e. terdapat data penyusutan aktiva tetap komersial sebagai berikut:
   - metode penyusutan garis lurus dan masa manfaat sesuai dengan ketentuan di Pasal 11 UU Pajak Penghasilan;
   - penyusutan aktiva tetap kelompok 1 sebesar Rp150.000.000;
   - penyusutan aktiva tetap kelompok 2 sebesar Rp1.234.000.000;
   - penyusutan aktiva bangunan permanen sebesar Rp300.000.000

f. Angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayar sendiri oleh perusahaan sebesar Rp1.300.000.000;

g. Dalam pengeluaran keuangan PT. Oye di tahun 2015 terdapat pemotongan/pemungutan pajak sebagai berikut:
   - PPh atas sewa *charter* pesawat perusahaan penerbangan dalam negeri Rp27.000.000;
   - PPh atas impor barang sebesar Rp200.000.000;
   - PPh atas sewa tanah milik Tn. Adi sebagai tempat parkir sebesar Rp9.800.000;
   - PPh atas jasa yang dikenakan PPh Pasal 23 sebesar Rp16.000.000.

Diminta:

a. Berapa PPh kurang/lebih dibayar PT. Oye di tahun 2015!

b. Buatlah jurnal atas PPh kurang/lebih dibayar tersebut!

……………………………………
JURNAL UMUM
PER …………………………

Tanggal	Nama Akun	Ref.	Debet	Kredit

11. Studi Kasus XI

Terdapat beberapa Wajib Pajak yang diperkenankan memakai pembukuan dengan bahasa Inggris dan mata uang US Dollar dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Sebutkan minimal lima Wajib Pajak yang dimaksud!

12. Studi Kasus XII

Berikut data transaksi PT. JKL (PKP) yang telah melakukan perjanjian sewa guna usaha tanpa hak opsi dengan beberapa pihak, yaitu:

a) tanggal 10 Oktober 2015 menagih sekaligus menerima pembayaran dengan nilai sewa sebesar Rp33.000.000 dari PT. MNO (PKP) atas leasing aktiva peralatan kantor.
b) tanggal 15 Oktober 2015 menagih dan seminggu kemudian menerima pembayaran dengan nilai sewa sebesar Rp55.000.000 dari Mr. Chong Li (WNA) atas leasing aktiva peralatan kantor.
c) tanggal 25 November 2015 menagih dan seminggu kemudian menerima pembayaran dengan nilai sewa sebesar Rp22.000.000 dari Tn. Rohadi (bukan PKP) atas leasing aktiva berupa gudang.

Data transaksi tersebut belum termasuk pajak. Jelaskan aspek akuntansi perpajakan atas transaksi dari semua pihak tersebut dan buatlah jurnalnya!

Jawab:

13. Studi Kasus XIII

Tn. Nasdi membeli mesin secara *leasing* dengan hak opsi pada tanggal 1 Juli 2013 seharga Rp200.000.000. Aktiva leasing tersebut disusutkan berdasarkan kelompok II dengan metode saldo garis lurus. Masa leasing adalah selama tiga tahun dengan pembayaran setiap enam bulan dengan skema sebagai berikut:

Angsuran	Tanggal	Pokok	Bunga	Total
1	31/12/2013	29.403.494	10.000.000	39.403.494
2	30/06/2014	30.873.668	8.529.826	39.403.494
3	31/12/2014	32.417.352	6.986.142	39.403.494
4	30/06/2015	34.038.219	5.365.275	39.403.494
5	31/12/2015	35.740.130	3.663.364	39.403.494
6	30/06/2016	37.527.137	1.876.357	39.403.494

Bagaimana implikasi akuntansi perpajakan atas data dari Tn Nasdi di tahun pajak 2013 dan 2014!

Jawab:

14. Studi Kasus XIV

Tahun 2015 PT. Prima Abadi mengalihkan hartanya sebagai penyertaan modal kepada PT. Sejahtera berikut:

- Nilai Perolehan Mesin Rp1.000.000.000
- Akumulasi penyusutan komersial Rp600.000.000
- Akumulasi penyusutan fiskal Rp800.000.00,-
- Dialihkan sebagai setoran modal PT. Sejahtera atas 400 lembar saham dengan Nilai Nominal per lembar Rp1.000.000
- Harga Pasar Mesin Rp500.000.000

Diminta:

a. Buat jurnal di PT. Prima Abadi dan Rekonsiliasi Fiskal pada saat mengisi SPT Tahun 2015!

b. Buat jurnal di PT Sejahtera!

Jawab:

15. Studi Kasus XV

Berikut ini adalah informasi transkasi PT Stan pada tahun 2014 dan 2015:

- Tanggal 1 Januari 2014 Investasi sebesar Rp220.000.000 pada PT Bintaro dengan prosentase kepemilikan 22 %. Pembukuan PT. Stan dan PT. Bintaro dengan periode 1 Januari sampai 31 Desember.
- Tahun buku 2015 PT Bintaro memperoleh Laba setelah Pajak sebesar Rp500.000.000.
- Tanggal 15 Januari 2015 PT. Bintaro mengumumkan pembagian dividen dari laba tahun 2014 sejumlah Rp300.000.000 ,
- Tanggal 30 Januari 2015 dividen dibayar tunai oleh PT Bintaro.

Diminta:

Buat jurnal per tanggal di atas untuk PT. Stan!

Jawab:

…………………………………….
JURNAL UMUM
PER …………………………

Tanggal	Nama Akun	Ref.	Debet	Kredit

16. Studi Kasus XVI

Tahun 2014 PT. Kalimongso melakukan revaluasi aktiva tetap karena berniat IPO. Total nilai buku aktiva yang direvaluasi Rp5.000.000.000 dan akumulasi penyusutan komersial Rp 3.500.000.000 akumulasi Penyusutan fiskalnya Rp 4.500.000.00,-. PT. Kalimongso memperoleh ijin dari Kanwil DJP Banten untuk melakukan revaluasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79. Nilai aktiva setelah revaluasi Rp10.000.000.000 dan Stock Dividen yang dibagikan adalah Rp9.500.000.000, Pemegang saham semuanya Orang Pribadi.

Buat jurnal sesuai kronologis diatas!

Jawab:

…………………………………….
JURNAL UMUM
PER …………………………

Tanggal	Nama Akun	Ref.	Debet	Kredit

17. Studi Kasus XVII

Pada tanggal 1 Oktober 2014 PT Industri Pangan Indonesia sedang memasang mesin pabrik baru pada fasilitas produksinya. PT Industri Pangan Indonesia mengeluarkan biaya-biaya berikut ini:

- Biaya perolehan mesin pabrik (berdasarkan *invoice* dan *supplier*) Rp1.000.000.000
- Biaya pengiriman dan penanganan awal Rp 100.000.000
- Biaya pemasangan Rp 120.000.000

Umur ekonomis ditaksir 6 tahun dan nilai residu sebesar Rp20.000.000. Berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan, mesin tersebut termasuk Kelompok 2. Metode penyusutan adalah Garis Lurus, baik secara akuntansi maupun secara fiskal.

Pada tanggal 1 Oktober 2016 PT Industri Pangan Indonesia menjual mesin kepada PT Pangan Jaya dengan harga sebesar Rp 850.000.000. Biaya pembongkaran mesin sebesar Rp 5.000.000 menjadi tanggungan PT Pangan Jaya. Harga pasar mesin tersebut adalah Rp 950.000.000. PT Industri Pangan Indonesia mempunyai penyertaan modal pada PT Pangan Jaya sebesar 30%.

Diminta:

a. Hitung harga perolehan mesin pabrik tanggal 1 Oktober 2014
b. Hitung keuntungan atau kerugian penjualan mesin pada tanggal 1 Oktober 2016 baik secara akuntansi maupun secara fiskal bagi PT Industri Pangan Indonesia!
c. Atas transaksi tersebut, apakah bagi PT Pangan Jaya terdapat penghasilan yang merupaka Objek Pajak? Kalau ada, jelaskan alasan dan dasar hukumnya!

Jawab:

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

18. Studi Kasus XVIII

PT BELAJAR berencana mengajukan permohonan untuk memperoleh ijin menyelenggaraan pembukuan bahasa Inggris dengan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat pada awal tahun buku kalender 2015 untuk pertama kali. Pad a tanggal 31 Desember 2014, diketahui kurs tengah BI sebesar 1 US$ = Rp12.800, kurs menteri keuangan 1 US$ = Rp12.750. Metode penyusutan menggunakan saldo menurun baik komersial dan fiskal. Perusahaan memiliki data sebagai berikut:

- Tanah dibeli pada tanggal13 Agustus 2010 dengan harga Rp15.000.000.000. Kurs transaksi yang berlaku 1 US$ = Rp10.650 dan kurs menteri keuangan 1 US$ = Rp10.750;
- Saldo piutang sebesar Rp450.000.000 per 31 Desember 2014, piutang tersebut berasal dari penjualan kredit gedung pada tanggal2 Juli Agustus 2014. Kurs transaksi yang berlaku 1 US$ = Rp12.350 dan kurs menteri keuangan 1 US$ = Rp12.250;
- Mesin dengan masa manfaat komersial 10 tahun (fiskal termasuk kelompok 2), dibeli pada tanggal 5 Juni 2012 dengan harga Rp1.500.000.000. Kurs transaksi yang berlaku 1 US$ = Rp11.100 dan kurs menteri keuangan 1 US$ = Rp11.050.

Pertanyaan:

a. Jelaskan dengan singkat ketentuan permohonan PT. BELAJAR sampai dengan memperoleh ijin menyelenggaraan pembukuan bahasa Inggris dengan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat!

b. Berapa nilai aktiva tetap, akumulasi penyusutan aktiva tetap dan piutang dalam mata uang Dollar Amerika Serikat di neraca per 31 Desember 2014 jika memperoleh ijin menyelenggaraan pembukuan dengan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat untuk tahun kalender 2015!

Jawab:

---

19. Studi Kasus XIX

PT Jaya Sentosa menyewa aktiva tetap dari PT Indoleasing dengan cara Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (*Finance Lease*). Harga wajar/pasar (*fair value*) aktiva tetap tersebut adalah sebesar Rp1.000.000.000 dan dibayar setahun dua kali selama enam kali. Jumlah setiap pembayaran adalah sebesar Rp180.000.000 dan pembayaran pertama dilakukan pada saat penyerahan aktiva tetap diterima. Nilai residu setelah tiga tahun (akhir masa Sewa Guna Usaha) adalah Rp40.000.000. Suku bunga implisit (*implisit interest rate*) untuk Sewa Guna Usaha tersebut adalah 9,3% per tahun, dan nilai sekarang (present value) dari pembayaran sewa minimum (*minimum lease payment*) adalah Rp969.360.000. Pada akhir masa Sewa Guna Usaha, PT Jaya Sentosa menggunakan hak opsi.

Tabel Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi adalah sebagai berikut: (dalam Rupiah)

Pembayaran ke	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Bunga	Pokok Angsuran	Sisa Pokok Pinjaman
1	30 Juni 2015	180.000.000		180.000.000	789.360.000
2	31 Desember 2015	180.000.000	36.705.240	143.294.760	646.065.240
3	30 Juni 2016	180.000.000	30.042.034	149.957.966	496.107.274
4	31 Desember 2016	180.000.000	23.068.988	156.931.012	339.176.262
5	30 Juni 2017	180.000.000	15.771.696	164.228.304	174.947.958
6	31 Desember 2017	180.000.000	5.052.042	174.947.958	0

Secara akuntansi, umur ekonomis aktiva tetap tersebut adalah lima tahun. Secara fiskal, aktiva tetap tersebut temasuk kelompok I. Tahun pajak adalah tahun takwim.

Diminta:

Buat Penyesuaian Fiskal untuk pembebanan biaya baik secara akuntansi maupun secara fiskal untuk tahun pajak 2015,2016, dan 2017 bagi PT Jaya Sentosa!

Jawab:

20. Studi Kasus XX

PT BERUSAHA telah memperolehfasilitas PPh Pasal 31A berdasarkan PP Nomor 18tahun 2015 pada bulan November 2015. Berikut ini disajikan data perusahaan:

a. Pada bulan April 2015, jumlah Penanaman Modal saat permohonan pengajuan untuk mendapat fasilitas PPh Pasal 31A yaitu berupa mesin (fiskal kelompok 3) senilai Rp39.000.000.000, gedung permanen senilai RpS.500.000.000, persediaan barang senilai Rp2.000.000.000 dan tanah senilai Rp7.500.000.000; Seluruh harta tersebut dibeli di bulan Desember 2015;

b. Metode penyusutan menggunakan garis lurus baik komersial dan fiskal dan masa manfaat komersial sarna dengan ketentuan Pasal 11 UU PPh;

c. Peredaran bruto tahun 2016 sebesar Rp72 miliar, penghasilan neto komersial tahun 2016 sebesar Rp1.750.000.000, koreksi fiskal negatif Rp7.100.000.000 dan koreksi fiskal positif Rp7.200.000.000;

d. PPh yang dipotong/dipungut pihak lain di tahun 2016 adalah PPh Pasal 22 sebesar Rp12.000.000; PPh Pasal23 sebesar Rp13.000.000; PPh Pasal24 sebesar Rp14.000.000 dan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp15.000.000;

e. Selama tahun 2016 membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp16.000.000 dan STP PPh Pasal23 sebesar Rp2.260.000 (termasuk sanksi bunga Rp260.000);

f. Terdapat pembayaran dividen dari laba ditahan di bulan Maret 2017 kepada semua pernegang saham yaitu: sebesar Rp25.000.000 kepada Wajib Pajak luar negeri Z Ltd di negara Z (tarif P3B 12%), Rp12.500.000 kepada PT AYO dan Rp12.500.000 kepada BUT YES.

Berikan analisis akuntansi perpajakan Saudara atas data PT BERUSAHA tersebut!

Jawab:

21. Studi Kasus XXI

Jelaskan ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan atas revaluasi aktiva tetap berdasarkan PMK nomor *79/PMK.03/2008* dan PMK nornor *191/PMK.010/2015,* berikan contoh-contoh kasus dan penjurnalannya!

Jawab:

22. Studi Kasus XXII

Untuk menjawab soal soal dibawah ini agar diberhatikan PP 34 Tahun 2016, PMK 79 Tahun 2008 ketentuan PPh, Ketentuan PPN ketentuan pemotongan dan pemungutan.

PT. DEF Pada awal tahun 2018 membuka pabrik baru di bintaro, untuk aktiva tetap pada pabrik baru berrikut kebijakan PT. DEF

a. Tanah dan bangunan pabrik perusahaan menyewa tanah dan bangunan pabrik di cikarang kepada PT. General Motor untuk sepuluh tahun dengan nilai pertahun 100.000 USD , transaksi dilakukan tanggal 5 Januari 2018 dibayar kas seluruhnya (Pendekatan aktiva) Buat jurnal saat pembayaran. Kurs tengah BI Rp13.500,- kurs KMK Rp14.000 kurs realisasi Rp14.500

b. Mesin dilakukan dengan *leasing*, masa manfaat ekonomis lim tahun masa *leasing* lima tahun, nilai perolehan Rp10.000.000.000

Mesin *leasing*

Finance	Hutang pokok	Bunga	Cicilan	Cicilan pokok dab bunga	
01/01/2018	10.000.000.000				
31/12/2018	8.295.000.000	800.000.000	1.705.000.000	2.505.000.000	8.295.000.000
31/12/2019	6.454.000.000	664.000.000	1.841.000.000	2.505.000.000	6.454.000.000
31/12/2020	4.466.000.000	517.000.000	1.988.000.000	2.505.000.000	4.466.000.000
31/12/2021	2.319.000.000	358.000.000	2.147.000.000	2.505.000.000	2.319.000.000
31/12/2022		186.000.000	2.319.000.000	2.505.000.000	
		2.525.000.000	10.000.000.000	12.525.000.000	-

Buat jurnal tanggal 5 Januari 2018, 31 Desember 2018 dan rekonsiliasi fiskal tahun 2018.

c. Tanggal 5 Januari melakukan kontrak sewa menyewa sedan untuk mobil dinas direksi empat buah untuk dua tahun @ Rp5.000.000 perbulan, dibayar perbulan. Buat jurnal di bulan januari 2018 dan rekonsiliasi fiscal 31 Desember 2018;

d. Untuk kepentingan operasional perusahaan membeli 10 unit sepeda motor @ Rp15.000.000 melalui FIF *Leasing* Cicilan perbulan pokok Rp250.000 bunga Rp250.000 ,- perunit selama lima tahun tanpa uang muka, bunga flat

23. Studi Kasus XXIII

Setoran Modal dalam bentuk aktiva PT.ABC, didirikan tanggal 5 Januari 2018 oleh PT.A, PT B dan PT.C dengan modal dasar 10.000.000.000 @ Rp1.000.000,

PT	Aktiva yang disetorkan	Nilai perolehan	Akumulai Peny usutan Komersial	Nilai Sisa Buku Komersial	Akumulai Peny unustan Fiskal	Nilai Sisa Buku Fiskal	Nilai Pasar	Lembar
A	Tanah	1.000.000.000						
	Bangunan	2.000.000.000	500.000.000	1.500.000.000	500.000.000	1.500.000.000	7.500.000.000	3.750
B	Mesin	3.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000		1.500
C	Kendaran	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.200.000.000	800.000.000		1.000
								6.250

Buatkan jurnal setoran modal tanggal 5 Januari 2018 yang dilakukan oleh PT. A , PT B dan PT C dan buat rekonsiliasi fiscal Pada PT A, PT B dan PT C saat melaporkan SPT Tahun 2018 khusus untuk transkasi tersebut.

Jawab:

…………………………………..
JURNAL UMUM
PER …………………………

Tanggal	Nama Akun	Ref.	Debet	Kredit

24. Studi Kasus XXIV

PT. GHI melakukan penilaian kebali memenuhi syarat PMK 79 tanggal 5 Januari 2018 dalam rangka Initial! Public Offering (IPO). PT.ABCmelakukan penilaian kebali memenuhi syarat PMK79 tanggal 5 Januari 2018 informasi sebagai berikut :

Ak	Nilai perolahan	Akumulasi Penyusutan	Nilai sisa buku
Komersial	50.000.000.000	43.000.000.000	7.000.000.0C
Fiksal	50.000.000.000	48.000.000.000	2.000.000.0C
Setelah dinilai kembali nilai total aktiva	33.000.000.000		
PT ABC dari selisih penilaian kembali tersebut dibagikan sebagai deviden saham sejumlah			
Stock deviden	28.000.000.000		

Pemegang saham	Prosenstase
TuanA	25
PT.B	25
PT.C	20
Mr. X Singapore	10
BUTPQR	10
BVCorp Nederland	10

Buatkan jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sampai pembagian deviden saham!

Jawab:

…………………………………….

JURNAL UMUM

PER …………………………

Tanggal	Nama Akun	Ref.	Debet	Kredit

25. Studi Kasus XXV

PT. A dan B melakukan merger menjadi C Tahun 2018, Memenuhi PMK 79, Merger A dan B menjadi C dengan By Purchase, dengan keterangan Awal sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan PTA

Kas	100.000.000	Modal	50.000.000
Tanah	400.000.000	Laba ditahan	650.000.000
Bangunan	200.000.000		
	700.000.000		700.000.000

Harga Pasartanah dan bangunan milik PTA Rp. 3.000.000.000,-

Laporan Posisi Keuangan PTB

Kas	100.000.000	Modal	50.000.000
Mesin	200.000.000	Laba ditahan	250.000.000
	300.000.000		300.000.000

Keterangan detail tentang Asset A dan Saham Yang diperoleh dari Prusahaan baru

A	Tanah	400.000.000	400.000.000	
	Bangunan	500.000.000	500.000.000	
	Akumulasi	300.000.000	400.000.000	
	Book Value	200.000.000	100.000.000	diberikan 1.000 lembar saham C
B	Mesin	500.000.000	500.000.000	diberikan 500 lembar saham C
	Akumulasi	300.000.000	350.000.000	
	Book Value	200.000.000	150.000.000	

C C Diririkan dengan 2500 lembar saham @ 1.000.000,-

Diminta:

Buat jurnal saat menyerahkan aktiva tanah dan bangunan olehi A kepada C sebagai setoran modal dengan "*By Purchase*" sampai dengan jurnal likuidasinya

26. Studi Kasus XXVI

PT.A Investasi di PT B Rp300.000.000 dengan modal saham B ada tiga keadaan, jumlah Investasi PTA diawal dan deviden yang dibagikan dalam tiga keadaan adalah sama

	PTA. Investasi di PT. B	Tanggal	Nilai	Keadaan 1 Modal B
	PTA			1.000.000.000
1	Investasi saham di B	01-Jan-16	300.000.000	
2	Laba Perusahaan B	31-Des-16	500.000.000	
3	B Membagikan deviden	31-Des-16	200.000.000	

	PT A			1.500.000.000
1	Investasi saham di B	01-Jan-16	300.000.000	
2	Laba Perusahaan B	31-Des-16	500.000.000	
3	B Membagikan deviden	31-Des-16	200.000.000	

		Tanggal	Nilai	Keadaan 3 Modal B
	PT A			1.800.000.000
1	Investasi saham di B	01-Jan-16	300.000.000	
2	Laba Perusahaan B	31-Des-16	500.000.000	
3	B Membagikan deviden	31-Des-16	200.000.000	

Buatkan jurnal investasi PT. A ke Ke PT dalam tiga keadaan tersebut dan buatkan korkeksi fiskal tahun 2016 untuk mengisi SPT Pada masing keadaan tersebut diatas

a. Jelaskan pengakuan laba, rugi dan kredit pajak investasi di luar negri, serta apabila kepemilikan diatas 50 % baik sendiri maupun bersama sama, kapan pengakuan devidennya.

b. Wajib Pajak dipernolehkan menggunakan USD dan pembukuan dalam bahasa inggris, Tanggal 25 Januari 2018 kas membayar gaji USD 30.000 kurs KMK Rp14.000.- Kurs tengah BI Rp13.500,- kurs realisasi Rp13.750. hutang PPh 21dibayar tanggal9 Februari 2018 kurs KMK Rp14.500.- Kurs tengah BI Rp14.000,- kurs realisasi Rp14.250.

c. Sebutkan empat Fasilitas PPh

Jawab:
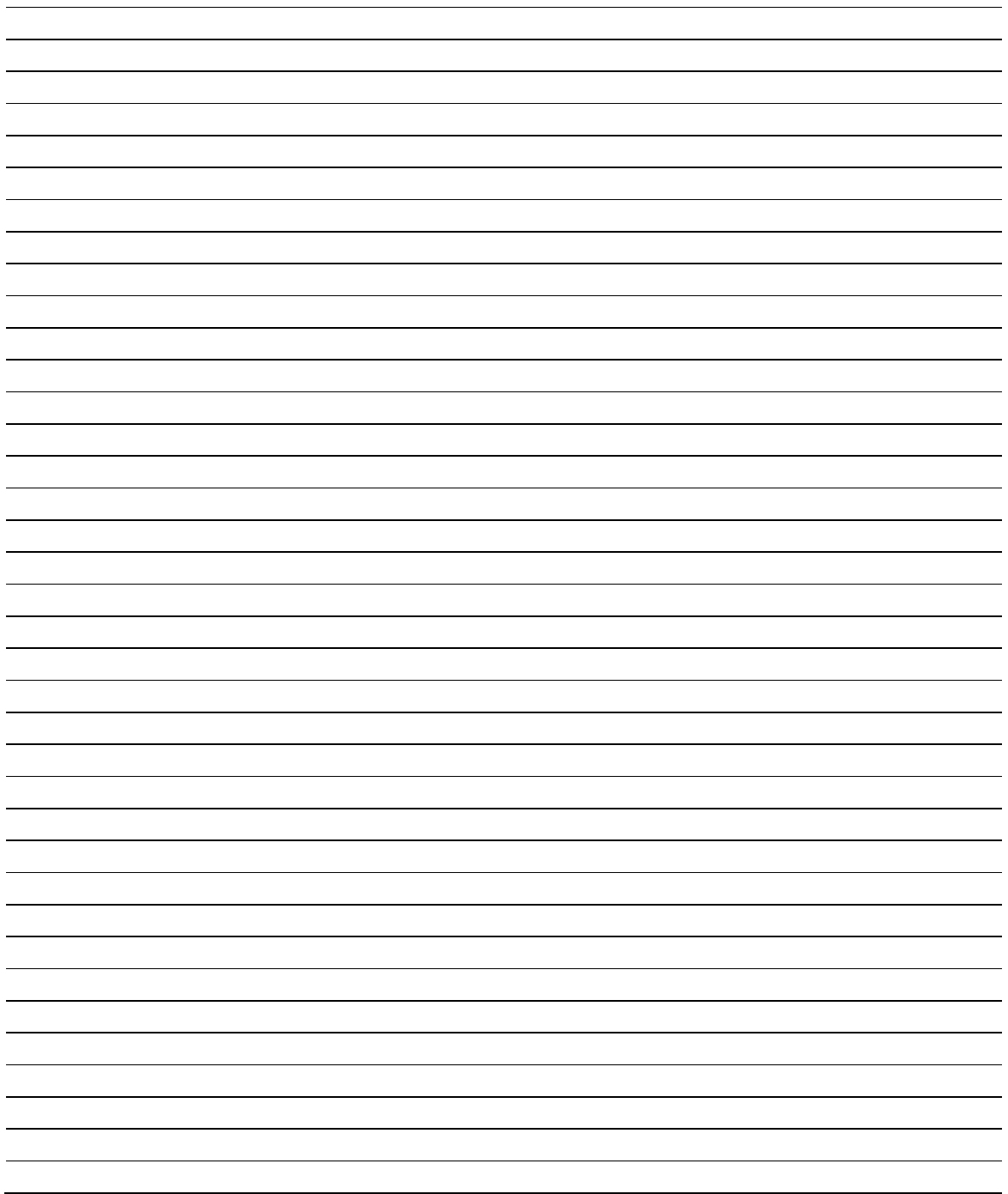
27. Studi Kasus XXVII

PT *The Lessee* melakukan transaksi sewa pembiayaan *(Capital Lease)* dengan PT *The Lessor* atas sebuah truk yang akan digunakan untuk usahanya. PT *The Lessor* meminta PT *The Supplier* untuk menyediakan truk dengan spesifikasi yang diminta PT *The Lessee* dan menyerahkannya kepada PT The Lessee. Skema transaksi dapat digambarkan sebagai berikut:
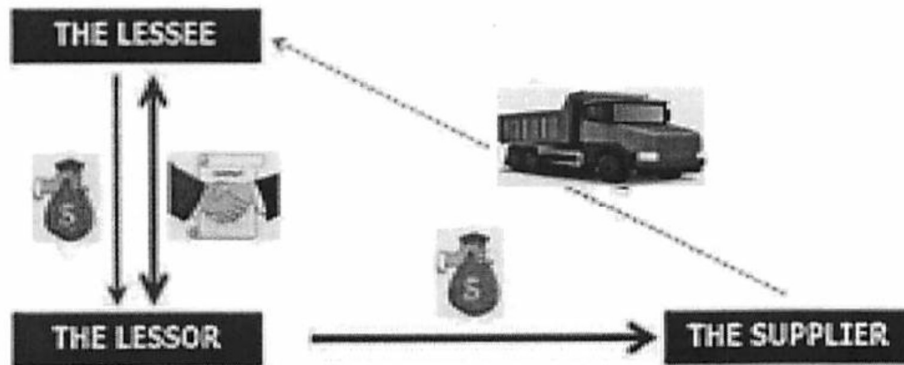
Tambahan informasi mengenai transaksi tersebut:

- Harga wajar/jual truk Rp190.000.000 (belum PPN)
- Masa sewa 5 tahun dimulai pada tanggal 31 Desember 2015
- Pembayaran sewa dilakukan tiap akhir tahun sebesar Rp50.000.000
- Masa manfaat komersial truk 6 tahun tanpa nilai residu
- Suku bunga pembiayaan 20% per tahun
- Pada akhir masa sewa, PT *Lessee* dipastikan menggunakan hak opsinya
- Metode penyusutan komersial dan fiskal: Garis Lurus
- Tabel pembayaran ditampilkan sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah Angsuran (Rp)	Beban Bunga (Rp)	Angsuran Pokok (Rp)	Hutang SGU (Rp)
31-12-2015	-	-	-	179.436.728
31-12-2015	50.000.000	-	50.000.000	129.436.728
31-12-2016	50.000.000	25.887.346	24.112.654	105.324.074
31-12-2017	50.000.000	21.064.815	28.935.185	76.388.888
31-12-2018	50.000.000	15.277.778	34.722.222	41.666.666
31-12-2019	50.000.000	8.333.333	41.666.666	0

Saudara diminta:

a. Menentukan pihak yang wajib menerbitkan faktur pajak keluaran atas penyerahan truk kepada PT *The Lessee* serta besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan tersebut.
b. Membuat jurnal yang dilakukan oleh PT *The Lessee* selama tahun 2015, 2016 dan 2017 serta membuat koreksi fiskal yang diperlukan (apabila ada).
c. Pada tanggal 1 Agustus 2017, PT Semoga Kau Bahagia mengajukan penilaian kembali aktiva tetap kepada Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan laporan dari KJPP Prasetiyanto dan Rekan, nilai aktiva yang dilakukan penilaian kembali sebagai berikut:

Jenis Aset	Tanggal Perolehan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penilaian Kembali (Rp)
Tanah	1 Desember 2005	2.500.000.000	3.500.000.000
Alat Berat	5 Mei 2015	600.000.000	450.000.000

Informasi lainnya:

- Masa Manfaat komersial alat berat adalah 5 tahun
- Masa manfaat fiskal alat berat masuk kelompok II
- Metode penyusutan komersial garis lurus
- Metode penyusutan fiskal saldo menurun

Saudara diminta:

a. Menentukan Peraturan Menteri Keuangan nomor dan tahun berapa yang digunakan sebagai dasar untuk mengenakan pajak atas permohonan penilaian kembali aktiva tetap tersebut di atas.
b. Menghitung besarnya nilai beban penyusutan fiskal atas alat berat untuk tahun pajak 2017.
c. Menghitung besarnya PPh Final atas penilaian kembali aktiva tetap tersebut

Jawab:

28. Studi Kasus XXVIII

Pada Mei 2017, PT Maju Mapan membayarkan dividen tahun 2016 yang berasal dari laba ditahan sebesar Rp7.750.300.000. Pembayaran dividen masing-masing kepada Tuan Ali (penyertaan saham 10%), PT Angin Ribut (penyertaan saham 20%), Koperasi Mitra Guna (penyertaan saham 20%), CV Pangrango (penyertaan saham 30%), dan Tuan Maun San (warga negara Papua Nugini dengan penyertaan saham 20%).

Saudara diminta:

a. Jelaskan dan hitung jenis pengenaan pajak dari transaksi dividen tersebut!

b. Buatlah jurnalnya kepada masing-masing pihak!

c. Kapan tanggal jatuh tempo dari penyetoran pajak atas dividen tersebut?

Jawab:

……………………………………

JURNAL UMUM

PER …………………………

Tanggal	Nama Akun	Ref.	Debet	Kredit

29. Studi Kasus XXIX

Pada tahun 2014, PT SCMA dan PT IDKM (keduanya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyiaran televisi) berencana melakukan penggabungan usaha (merger). Tanggal efektif penggabungan adalah 1 Juli 2014. Pada saat proses penggabungan, PT SCMA mempunyai rugi fiskal sebesar Rp1.000.000.000,OOsedangkan PT IDKM mempunyai laba fiskal sebesar Rp1.500.000.000,OO.Pemegang saham kedua perusahaan telah setuju untuk melakukan penggabungan usaha dengan menggunakan nilai buku dan diharapkan setelah adanya merger ini dapat menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan.

Semua hutang pajak telah dilunasi oleh PT SCMA dan PT IDKM dengan dibuktikan adanya tax clearance dari KPP tempat kedua perusahaan tersebut terdaftar. Kedua perusahaan berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, jawablah pertanyaan berikut:

a. Apakah Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk membatalkan proses penggabungan usaha PT SCMA dan PT IDKM karena merger kedua perusahaan tersebut menggunakan harga buku dan tidak menggunakan harga pasar? Jelaskan pendapat Saudara.

b. Apabila Saudara ditunjuk sebagai konsultan pajak yang menangani merger PT SCMA dan PT IDKM, apa yang akan Saudara lakukan agar proses merger dengan menggunakan nilai buku tersebut dapat disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak. Jelaskan jawaban Saudara dengan mencantumkan peraturan perpajakan yang relevan.

Jawab:

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

30. Studi Kasus XXX

Pada tanggal 25 Mei 2015, Firma Ceria membeli aktiva tetap berupa mesin seeara tunai dengan perincian pengeluaran sebagai berikut :

- Harga beli mesin sebesar Rp500.000.000.
- Biaya pengangkutan Rp10.000.000.
- Biaya asuransi pengangkutan Rp5.000.000.
- Biaya pemasangan mesin Rp20.000.000.
- Biaya pemeliharaan mesin selama 10 hari Rp10.000.000.

Untuk keperluan Akuntansi, mesin disusutkan dengan metode garis lurus selama 5 tahun dengan nilai residu Rp20.000.000., sedangkan untuk keperluan perpajakan, dengan metode saldo menurun. Mesin termasuk kelompok II. Karena sering mengalami gangguan, mesin tersebut dijual pada tanggal 8 Mei 2017 dengan harga Rp300.000.000.

Berdasarkan data tersebut:

a. Hitung nilai perolehan mesin
b. Buatlah penyusutan tahun 2015, 2016 dan 2017 berdasarkan akuntansi dan perpajakan
c. Hitunglah laba rugi penjualan aktiva menurut akuntansi dan perpajakan.
d. Buatlah jurnal yang diperlukan selama tahun 2015,2016, dan 2017, yang berhubungan dengan mesin tersebut.

Jawab:

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

…………………………………….
JURNAL UMUM
PER …………………………

Tanggal	Nama Akun	Ref.	Debet	Kredit

31. Studi Kasus XXXI

PT XYZ adalah perusahaan dagang yang bergerak di bidang perdagangan telepon selular beserta sparepart dan aksesorisnya. Perusahaan menggunakan metode FIFO untuk menghitung persediaannya. Pada tahun 2018 terdapat mutasi persediaan HP Samsung Galaxy S10 sebagai berikut:

- Persediaan awal10 unit @ Rp 4.000.000
- Pembelian 6 unit @ Rp 4.200.000
- Pembelian 4 unit @ Rp 3.900.000
- Penjualan 6 unit @ Rp 4.500.000
- Penjualan 6 unit @ Rp 4.600.000
- Pembelian 2 unit @ Rp 4.100.000
- Penjualan 6 unit @ Rp 4.750.000

Tidak ada barang rusak dan hilang di akhir tahun dan pada akhir tahun diketahui nilai realisasi bersih (harga jual dikurangi *cost to sem* adalah sebesar Rp 3.800.000

Hitunglah:

a. Nilai persediaan selama 2018 menurut akuntansi dan pajak!

b. Nilai Harga Pokok Penjualan selama 2018 menurut akuntansi dan pajak!

c. Laba kotor selama 2018 menurut akuntansi dan pajak!

Jawab:

32. Studi Kasus XXXII

Buatlah sebuah *case* perusahaan jasa konstruksi dengan kualifikasi keeil memberikan jasa pelaksanaan konstruksi kepada sebuah satker pemerintah, dimulai dari pembayaran uang muka, termin pembayaran sampai dengan pelunasannya di suatu tahun kalender. Uraikan aspek perpajakannya dan buatlah jurnal untuk masing-masing pihak.

Jawab:

DAFTAR PUSTAKA

Buku dengan Pengarang Tunggal:

Agoes, Soekrisno, & Trisnawati, E. (2014). *Akuntansi Perpajakan* (3 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Gunadi. 2017. Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Jakarta: MUC Publishing

Gunadi. 2002. Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: MUC Publishing.

Kurnia Rahayu, Siti. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal. Penerbit Rekayasa Sains,

Lyons, Susan M. 1996. *International Tax Glossary. International Buerau of Fiscal Documentat*ion.

Marbun, S.F. 1997. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Mulyadi.2008. Auditing. Jakarta : Salemba Empat Musgrave, Richard. 1989. *Public Finance in Theory and Practice. New York: McGraw-Hill Book Company.*

Muljono, D. (2010). *Panduan Brevet Pajak - Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Opungsunggu, Arles P. 2011. Cara Legal Siasati Pajak. Puspa Swara. Depok.

Pandiangan, Liberti (2014). Aministrasi Perpajakan. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Saidi, Muhammad Djafar. 2007. Pembaharuan Hukum Pajak. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Seligman, R A. 1925. *Essays on Taxation*. New York: Macmilan.

Skusen Mark. 2005. Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern. Jakarta: Prenada. Soemahamidjaja,

Soemitro, Rochmat. 1991. Pajak Ditinjau dari Segi Hukum. Bandung: PT. Eresco.

Soeparman. 1964. Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soemitro, Rochmat. 1997. Asas dan Dasar Perpajakan 2. Bandung: PT Eresco.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.

Suandy, Erly. 2002. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly. (2011). Hukum Pajak. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Sundoro. 2004. Studi Kasus Banding Pengadilan Pajak: Buku Satu Tata Cara dan Dasar Hukum. Jakarta: Semar Publishing.

Waluyo. 2010. Akuntansi Pajak. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Buku dengan dua pengarang:

B. Ilyas, Wirawan., & Burton, Richard. (2013). Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Prenada Media Group.

Mutopo, Purno, Sjafardamsah dan Binsarjono, Tugiman. 2011. Perpajakan Pendekatan Sertifikasi A-B-C. Mitra Wacana Penerbit.

Nurmantu, Safri dan Samudra. 2003. Dasar-Dasar Perpajakan: Edisi Kedua. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.7 Pertiwi,

Setiawan, Benny dan Fitriadi, Primandita. Kupas Tuntas PPh POTPUT. Penerbit Salemba Empat Jakarta.

Peraturan

Direktorat Jenderal Pajak. (1986). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 27/PJ.22/1986 tentang Biaya "Entertainment" dan Sejenisnya*.

Direktorat Jenderal Pajak. (1995). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 46/PJ.4/1995 tentang Perlakuan Biaya Bunga yang Dibayar atau Terutang dalam Hal Wajib Pajak Menerima atau Memperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito atau Tabungan Lainnya*. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak. (2002a). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan*. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak. (2002b). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 02/PJ.42/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengeluaran untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak. (2009). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 51/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/atau Minuman Bagi Pegawai, Kriteria dan Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu, dan Batasan Mengenai Sarana dan Fasilitas di Lokasi Kerja*. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak. (2010). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 62/PJ/2010 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto*. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 30/PJ/2017 tentang Perubahan Keempat atas Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya*. Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.03/2018 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan*. Jakarta.

TENTANG PENULIS

Supriyadi, S.E., M.Si., BKP., lahir di Blora pada tahun 1979 dan sekarang berdomilisi di Jatiasih, Kota Bekasi. Menyelesaikan Pendidikan Diploma III di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Tahun 2000, selanjutnya melanjutkan Pendidikan S1 Jurusan Akuntansi di STIE SWADAYA Jakarta pada Tahun 2004 dan S2 Jurusan Administrasi Pajak di STIAMI Jakarta pada Tahun 2013. Lulus mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) pada tahun 2013. Berpegalaman selama 20 tahun bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: KPP Jakarta Mampang Prapatan, KPP Madya Makassar, KPP Perusahaan Masuk Bursa dan Analis Potensi Perpajakan Senior pada *Center for Tax Analysis* (CTA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai panggilan jiwa untuk terus belajar dan mengajar penulis tergabung sebagai pengajar di Politeknik Keuangan Negara STAN untuk Jurusan Pajak dan dapat dihubungi melalui email: priesoekarno@pknstan.ac.id dan priesoekarno@gmail.com.

Arief Budi Wardana, S.S.T., M.A., lahir di Purwokerto pada tahun 1982 dan sekarang berdomisili di Tangerang Selatan. Menyelesaikan Pendidikan Diploma III dan Diploma IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), selanjutnya mendapatkan beasiswa untuk menempuh *Master of Art in Development Studies* di *ISS Erasmus Universiteit Rotterdam*, Belanda. Berpengalaman selama 15 tahun bekerja di Direktorat Jenderal Pajak sebelum terjun ke dunia akademis pada tahun 2019. Saat ini penulis tergabung sebagai pengajar di Program Studi Diploma 3 Pajak, Jurusan Pajak PKN STAN dan dapat dihubungi melalui email: wardana.arief@pknstan.ac.id.